



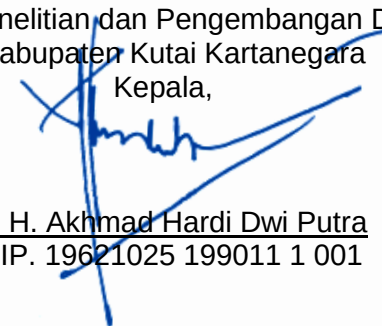
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, merupakan dokumen strategis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Balitbangda Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen rencana lima tahunan yang berisi informasi dan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategis, dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021 - 2026, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.

Tenggarong, 26 Agustus 2021

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,


Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
NIP. 19621025 199011 1 001



Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	73
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII PENUTUP	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi PD berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Renstra PD dibuat paling lama satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, sedangkan proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan renstra perangkat daerah, (2) penyusunan renstra perangkat daerah, (3) penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah, (4) penetapan renstra perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD). Penyusunan ini mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan lembaga yang mengkoordinir penyelenggaraan fungsi penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi bidang penelitian dan pengembangan daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut bekerja secara optimal sehingga penyelenggaraan pembangunan menjadi terarah, terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat menentukan arah pembangunan dengan meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maka tugas pokok dan fungsi kelitbangan daerah dirasakan lebih menunjang kearah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 045.2/2223/P1/XII/litbang/2012 yang menegaskan bahwa wewenang terkait dengan kelitbangan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga PD yang masih menganggarkan kegiatan kelitbangan dihimbau untuk berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta perencanaan kegiatan kelitbangan PD tersebut ke depannya dijadikan usulan salah satu program kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindihnya peran kelitbangan.



Dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan fungsi/kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Rekomendasi hasil penelitian/kajian belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh OPD yang terkait.
2. Jumlah Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa belum memenuhi syarat ideal jumlah peneliti dan perekayasa yang diperlukan.

Berdasarkan pasal 342 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kali-mantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri



- dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj/2016 tentang Tindak lanjut PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
 21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17).
 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah selama priode 5 (lima) tahun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, Renstra disusun dengan maksud memberikan **Arah** sekaligus menjadi **Acuan** bagi pemangku kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mewujudkan Visi, Misi Agenda Pembangunan dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih Tahun 2021-2026.

Adapun **Tujuan** Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi, Misi Agenda Pembangunan dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
2. Menyediakan Rekomendasi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sumber Dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, Digitalisasi, terintegrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan Kabupaten/Kota lainnya, serta antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal lain adalah mewujudkan Balitbangda Kutai Kartanegara sebagai Fasilitator, Regulator dan Motivator “ **GERAKAN INOVASI DAERAH** “ yang diharapkan mampu mendorong percepatan disemua lini pembangunan daerah. Dengan tersusunnya Renstra 2021 - 2026 Balitbangda Kutai Kartanegara lebih Focus dan Locus pada tugas pokok dan fungsinya, selain itu hasil Rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan operasional.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renstra-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah



dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan



Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dibentuk dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan Permendagri No. 56 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap susunan organisasi



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) seperti yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel. 1.2. Perubahan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2016
menjadi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019**

Perbup Nomor 42 Tahun 2016	Perbup Nomor 68 Tahun 2019
Kepala Badan	Kepala Badan
Sekretaris, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuanganan.	Sekretaris, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 4)
Bidang-Bidang, terdiri dari :	
1. Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan : a) Sub.Bid. Pemerintahan dan Daerah; b) Sub.Bid. Aparatur; c) Sub.Bid. Kelembagaan;	1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahkan : a) Sub.Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan; b) Sub.Bid. Pemerintahan Desa; c) Sub.Bid. Data dan Pengkajian Peraturan;
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, membawahkan : a) Sub.bid. Ekonomi Daerah; b) Sub.bid. Keuangan dan Aset Daerah; c) Sub.Bid. Pembangunan Daerah;	2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, membawahkan : a) Sub.Bid. Ekonomi; b) Sub.Bid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; c) Sub.Bid. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
3. Bidang Inovasi Daerah, membawahkan : a) Sub.Bid.ang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah; b) Sub.Bid. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah c) Sub.Bid. Pemanfaatan Inovasi Daerah.	3. Bidang Inovasi Daerah, membawahkan : a) Sub.Bid. Pengembangan Teknologi dan inovasi; b) Sub.Bid. Difusi inovasi dan Penerapan Teknologi; c) Sub.Bid. Desiminasi Kelitbangan;



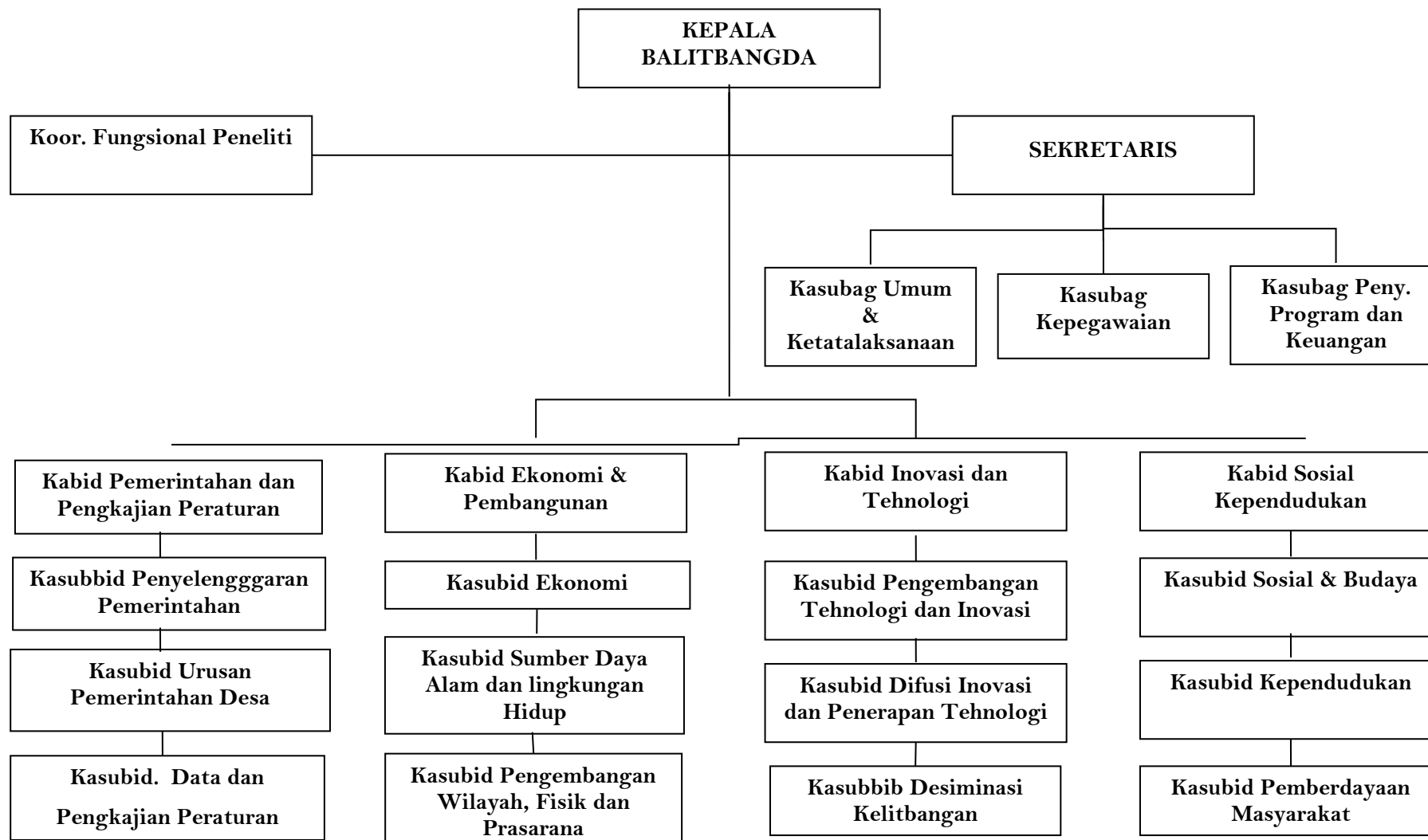
4. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan : a) Sub Bidang Sosial Budaya; b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; c) Sub Bidang Sejarah dan Kependudukan;	4. Bidang Sosial, Kependudukan, membawahkan : a) Sub.Bid. Sosial Budaya; b) Sub.Bid. Kependudukan; c) Sub.Bid. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.	5.Kelompok Jabatan Fungsional.
	6.Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2021-2026

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Balitbangda Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019



2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi. Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Pegawai, yang dirinci menurut status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA	23	33,33
2.	D.III	1	1,53
3.	S1	25	36.23
4.	S2	16	23,12
5.	S3	4	5,79
	TOTAL	69	100

Sumber Data : Sub bagian Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar, Tahun 2021

Gambaran tentang pendidikan pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah seperti yang terdapat pada tabel di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat 23 pegawai yang berpendidikan SLTA atau sekitar 33.33 % dari seluruh jumlah pegawai yang ada. Adapun pegawai yang berpendidikan Diploma terdapat 1 pegawai atau sekitar 1,53 % dari seluruh pegawai yang ada. Jumlah persentase terbesar adalah pegawai yang berpendidikan S1 yaitu 25 ASN atau sebesar 36.23 %, kemudian disusul pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 16 ASN atau sebesar 23.12 %, dan yang terakhir S3 sebanyak 4 ASN atau sebesar 5,79 %. dari semua ASN yang ada terdapat 4 Peneliti Fungsional, hal ini sangat jauh dari kebutuhan, *terdapat kekurangan sebanyak 13 ASN sebagai Peneliti Fungsional.*



Kesadaran dan upaya pegawai serta komitmen organisasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang dimilikinya merupakan modal bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk meningkatkan kinerja. Hal ini sejalan dengan perubahan struktur kelembagaan yang sangat menuntut produktifitas dan daya saing yang tinggi sehingga dapat menunjang kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan.

Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting dibandingkan sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana, yang merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kegunaan sarana dan prasarana ini antara lain untuk: (1) Menunjang kegiatan ketatausahaan/ administrasi perkantoran; (2) Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparatur; serta, (3) Menunjang kegiatan Penelitian dan Pengembangan; (4) Menunjang kegiatan diseminasi hasil litbang; dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kutai kartanegara 2021 – 2026 terdapat target dan sasaran yang hendak dicapai. Selama kurun waktu tersebut diatas realisasi target dan sasaran yang telah dicapai sebagaimana tergambar pada Tabel T-23 dan Tabel T-24 :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	A	B	B	BB	BB	A	B	B	BB	BB	A	B	B	BB	BB	A
				Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	B	B	BB	BB	A	B	B	BB	BB	A	B	B	BB	BB	A
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	24	24	24	48	24	24	24	24	48	24	17	33,333333	50	83,333333	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	170	41	35	33	28	33	41	35	33	28	33	24	44,705882	64,117647	80,588235	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah jasa administrasi keuangan	770	216	123	123	100	208	216	123	123	100	208	28	44,025974	60	72,987013	100
	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah Alat Tulis Kantor	131	26	30	30	15	30	26	30	30	15	30	20	42,748092	65,648855	77,099237	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	8755	1000	1750	3000	5	3000	1000	1750	3000	5	3000	11	31,410623	65,676756	65,733866	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundang-Undangan	0	0	0	0		0	0	0	0		0					
	Penyediaan bahan logistik kantor			Jumlah Bahan Logistik Kantor	1235		400	400	35	400		400	400	35	400	-	32,388664	64,777328	67,611336	100
	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah Makanan dan Minuman	8800	1200	1250	1250	3850	1250	1200	1250	1250	3850	1250	14	27,840909	42,045455	85,795455	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	656	71	95	95	300	95	71	95	95	300	95	11	25,304878	39,786585	85,518293	100

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran			Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	1932	384	384	384	396	384	384	384	384	396	384	20	39,751553	59,627329	80,124224	100
	Website				4	1	1	1		1	1	1	1		1	25	50	75	75	100
	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi penyelenggaraan pameran			Jumlah Pameran yang diikuti	4	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	-	0	0	50	100
	Belanja perangko, materai dan benda POS lainnya								570					570						
	Belanja alat listrik dan elektronika								200					200						
	Belanja Peralatan alat kebersihan dan bahan pembersih								200					200						
	Pemeliharaan , perawatan dan pengawasan arsip aktif dan in aktif Balitbangda								25000					25000						
	Penerbitan buletin dan jurnal ilmiah sebagai media komunikasi								2					2						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik		86	87	87	88	88	86	87	87	88	88	86	87	87	88	88
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantor	112	0	10	35	32	35	0	10	35	32	35	-	8,9285714	40,178571	68,75	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantor	100	0	0	35	30	35	0	0	35	30	35	-	0	35	65	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123	1	30	30	32	30	1	30	30	32	30	1	25,203252	49,593496	75,609756	100

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan	25	0	5	6	8	6	0	5	6	8	6	-	20	44	76	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	113	0	1	35	42	35	0	1	35	42	35	-	0,8849558	31,858407	69,026549	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	118	0	16	35	32	35	0	16	35	32	35	-	13,559322	43,220339	70,338983	100
	Penerbitan Buletin Jurnal			Jumlah Buletin Jurnal	800	200	200	200		200	200	200	200		200	25	50	75	75	100
	Program Peningkatan Disipilin Pegawai			Jumlah pelanggaran disiplin ASN		15	10	7	5	4	15	10	7	5	4	15	10	7	5	4
	Fasilitasi manajemen perubahan				3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	-	0	0	100	100
	Penerbitan buletin Gerbang BalitbangdaKU				100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	-	0	0	100	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	100	85,90	86,48	87,19	87,84	88,51	85,90	86,48	87,19	87,84	88,51	85,90	86,48	87,19	87,84	88,51
	Diklat Teknis SDM Aparatur BALITBANGDA			Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	20	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	-	0	0	50	100
	Penguatan Perpustakaan			Jumlah dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	40	60	80	100
	Fasilitasi Bekias			Jumlah Inovasi	4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	-	25	50	75	100
	Penguatan perpustakaan E-Library								12					12						
	Lomba karya ilmiah remaja (LKIR)								120					120						
	Fasilitasi peningkatan SMD								15					15						

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	440	86	54	100	100	100	86	54	100	100	100	86	54	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Balitbangda			Jumlah laporan	39		9	10	10	10		9	10	10	10	-	23,076923	48,717949	74,358974	100
				Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset		78	78	100	100	100	78	78	100	100	100	78	78	100	100	100
	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Balitbangda			Jumlah laporan	41	9	5	9	9	9	9	5	9	9	9	22	34,146341	56,097561	78,04878	100
				Persentase Temuan Audit Yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi temuan BPK dan Inspektorat			Jumlah laporan	4		1	1	1	1		1	1	1	1	-	25	50	75	100
				Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian/Inovasi Yang Terimplementasi		83	100	100	100	100	83	100	100	100	100	83	100	100	100	100
	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan								16					16						
	Monitoring dan evaluasi kegiatan Balitbangda								12					12						
	Inventarisasi BMD Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegar					Di Kabupaten Kutai Kartanegar						
	Fasilitasi study persiapan pembentukan unit pelaksana teknis badan (UPTB) Litbang								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Program Penelitian Umum			Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	276	29	33	43	71	100	29	33	43	71	100	29	33	43	71	100

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian Penelitian di sub Bidang Ekonomi Daerah																			
	Kajian ekonomi dan penggunaan pupuk organik dalam usaha tani di Kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1	1					1					100	100	100	100	100
	Kajian ekonomi masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan rencana TAHURA Muara siran Kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1		1					1				-	100	100	100	100
	Kajian Pengembangan Home Industri Minuman dan Makanan Berbahan Baku Buah Naga di Kec. Loa Janan dan Samboja			Jumlah Dokumen	#VALUE!				4 KUB (2 Kecamatan)					4 KUB (2 Kecamatan)						
	Kajian Pengembangan Industri kecil Pakan Ternak dan Pakan Ikan Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Kajian Penelitian di sub Bidang Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen	0															
	Kajian sistem tataniaga pemasaran komoditi jagung dan padi			Jumlah Dokumen	1			1					1			-	0	100	100	100
	Kajian Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun di Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Kab Kukar			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian Pengembangan sarana dan Prasarana Transportasi Sebagai Penunjang Obyek Wisata di Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Kajian Penelitian di sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah Dokumen	0															
	Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Produktif di Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Analisis Strategi Peningkatan PAD di Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang ekonomi dan pembangunan			Jumlah Dokumen	12	5		1	3	3	5		1	3	3	42	41,666667	50	75	100
	Kajian Potensi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Bahan Rencana Penyusunan Pembangunan Daerah								Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu					Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu						
	Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Evaluasi Pelaksanaan Program Revolusi Jagung Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian Pengembangan Jaringan Trayek Transportasi Umum Antar Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Lingkup Pertanian dan Perikanan								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Skala Prioritas Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Efektifitas Kombinasi Penggunaan Pupuk Organik dan An Organik pada Tanaman Padi Sawah Terhadap Pendapatan Petani								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Sebagai Penunjang Obyek Wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Peran Serta Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun di Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						

[illegible]

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian penelusuran sejarah kerajaan kutai martadipura			Jumlah Dokumen	1			1					1			-	0	100	100	100
	Kajian Penyelenggaraan Erau dan Pengaruhnya ditinjau dari perspektif Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian peranan Lembaga Adat dalam meningkatkan Motivasi, Pengetahuan dan Keterampilan Msyarakat terhadap seni Budaya			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang sosial budaya dan kemasyarakatan			Jumlah Dokumen	4	1		1	1	1	1		1	1	1	25	25	50	75	100
	Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Kajian Penggalian Situs Cagar Budaya Di Kec. Muara Kaman								Kec. Muara Kaman					Kec. Muara Kaman						
	Kajian Penyebaran Aliran Baha'i Di Kabupaten Kutai Kartanegara								Kec. Tenggarong & Kec. Tenggarong Seberang					Kec. Tenggarong & Kec. Tenggarong Seberang						
	Pembuatan Biografi Aji Muhamad Sulaiman								Kec. Tenggarong					Kec. Tenggarong						
	Kajian Erau Berdasarkan Perspektif Pelestarian Budaya								Kec. Tenggarong					Kec. Tenggarong						

[illegible]

[illegible]

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kajian tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen berdasarkan Perda No.6 Tahun 2012			Jumlah Dokumen	1			1					1			-	0	100	100	100
	Kajian Implementasi Perbup no.35 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan desa kab.kukar			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian implementasi peraturan daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Studi Kelayakan Naskah Akademik Persiapan Kabupaten Kutai Tengah																			
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang penelitian			Jumlah Dokumen	3			1	1	1			1	1	1	-	0	33,333333	66,666667	100

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara								5 Pelayanan Dasar/11 Kecamatan (Kec. Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Muntai, Sebulu, Tenggarong Sebrang, Loa Kulu, Muara Jawa, Samboja, Anggana dan Tenggarong)				5 Pelayanan Dasar/11 Kecamatan (Kec. Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Muntai, Sebulu, Tenggarong Sebrang, Loa Kulu, Muara Jawa, Samboja, Anggana dan Tenggarong)							
	Kajian Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara								16 Perangkat Daerah				16 Perangkat Daerah							
	Kajian Pemetaan ASN dan Non ASN Dalam Rangka Mendukung Profesionalisme Aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara								Di Kabupaten Kutai Kartanegara				Di Kabupaten Kutai Kartanegara							
	Kajian Regulasi Daerah tentang Tunjangan Tenaga Medis dan Para Medis Di Kabupaten Kutai Kartanegara								3 RSUD dan 32 Puskesmas				3 RSUD dan 32 Puskesmas							

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian Strategis Penguatan Program Padu-Desk (Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan) Di Kabupaten Kutai Kartanegara								20 Desa & 10 Kelurahan				20 Desa & 10 Kelurahan							
	Kajian Optimalisasi Penerapan Regulasi Terkait Kemudahan Investasi Daerah								Di Kabupaten Kutai Kartanegara				Di Kabupaten Kutai Kartanegara							
	Survey Indeks Persepsi Korupsi Di Kabupaten Kutai Kartanegara								PD & 18 Kecamatan				PD & 18 Kecamatan							
	Kajian Peran Kecamatan Dalam Pemanfaatan Dana CSR/TJSP Di Kabupaten Kutai Kartanegara								6 Kecamatan				6 Kecamatan							
	Kajian Pengembangan Desa Tertinggal Sebagai Upaya Menuju Pembangunan Desa Mandiri								30 Desa				30 Desa							
	Kajian Survey Indeks Kemandirian Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara								30 Desa				30 Desa							
	Program Inovasi Daerah			Cakupan Inovasi di bidang Teknologi	1	5	14	29	67	100	5	14	29	67	100	5	14	29	67	100
	Kajian Inovasi di sub Bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah			Jumlah Dokumen	1											-	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kajian karakteristik verietas jelai (coix lacyma-jobi) sebagai plasma nutfah tanaman pangan alternatif di Kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1	1					1					100	100	100	100	100
	Inventarisasi tanaman padi spesifik lokal sebagai plasma nutfah di Kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1			1					1			-	0	100	100	100
	Diseminasi Pelayanan Terpadu Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Pengembangan jejaring Intermediator Hasil Riset dan Teknologi			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian Penguatan Kewenangan Kecamatan Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Kajian Efektifitas UPTD sebagai perpanjangan tangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Kajian Inovasi di sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah			Jumlah Dokumen	1											-	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Identifikasi tingkat kerusakan hutan mangrove untuk perencanaan reboisasi pada delta mahakam di Kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1		1					1				-	100	100	100	100
	Kajian inovatif pengembangan kelembagaan usaha masyarakat dalam rangka mendukung revolusi jagung Kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1			1					1			-	0	100	100	100
	Kajian tanaman hortikultura pada lahan Pasca tambang dengan menggunakan pupuk organik di Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian Kawasan Pertanian Siklikal Terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian Pemanfaatan Lahan Marginal dengan Tanaman Galam di Kabupaten Kutai Katanegara			Jumlah Dokumen	1				Kec. Kenohan, Ma. Muntai, Ma. Wis, Ma. Kaman	1				Kec. Kenohan, Ma. Muntai, Ma. Wis, Ma. Kaman	1	-	0	0	0	0
	Kajian uji adaptasi benih kelapa sawit pada lahan pasca tambang di kabupaten kutai kartanegara			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Kajian Inovasi di sub Bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah			Jumlah Dokumen	1											-	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kajian Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dalam rangka pemetaan potensi pajak daerah di kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian Agroindustri Jagung Dalam Rangka Mendukung Program Revolusi Jagung di kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1				1					1		-	0	0	100	100
	Kajian diversifikasi pemanfaatan tanaman jagung di kab. Kukar			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Kajian Inovasi sarana pendukung destinasi wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1					1					1	-	0	0	0	100
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang teknologi			Jumlah Dokumen	1		1	1	1	1		1	1	1	1	-	100	200	300	400
	Penyusunan rencana induk kelitbangan								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Uji adaptasi tanaman jelai (coix lacryma jobi L) hasil seleksi karakteristik agronomis								Kec. Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Ma. Jawa					Kec. Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Ma. Jawa						
	Pemutihan varitas padi lokal sebagai plasma nutfah di Kabupaten Kutai Kartanegara								Kec. Loa Kulu, Samboja, Tabang					Kec. Loa Kulu, Samboja, Tabang						
	Identifikasi Pendaftaran dan Usulan Pelepasan Varietas Buah Lai								Kec. Loa Janan, Kota Bangun					Kec. Loa Janan, Kota Bangun						

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tarrget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (Naskah Akademik)								10 PD					10 PD						
	Kajian Pemanfaatan buah Lai (Durio Kutejencis) Sebagai Salah Satu Bahan Obat-Obatan								Kec. Loa Janan					Kec. Loa Janan						
	Kajian Penguatan Kewenangan Kecamatan Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik								3 Kecamatan (9 Inovasi)					3 Kecamatan (9 Inovasi)						
	Kajian Tentang Pertanian Siklikal Terpadu Pada Tanaman Palawija								Kec. Tenggarong Seberang, Samboja					Kec. Tenggarong Seberang, Samboja						
	Pengembangan Jejaring Intermediator Hasil Riset dan Teknologi								Di Kabupaten Kutai Kartanegara					Di Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Pemanfaatan Penginderaan Jauh Sebagai Upaya Peningkatan Potensi PAD								Kec. Tenggarong					Kec. Tenggarong						
	Kajian Tentang Efektifitas UPTD Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian dalam rangka mendukung OPD Kabupaten Kutai Kartanegara								Kec. Kembang Janggut, Kec. Kenohan Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Marang Kayu Kec. Muara Badak (18 UPTD)					Kec. Kembang Janggut, Kec. Kenohan Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Marang Kayu Kec. Muara Badak (18 UPTD)						

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3																		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.553.026.385	976.184.445	903.738.000	921.968.000	1.435.696.440	2.315.439.500	976.184.445	903.738.000	921.968.000	1.435.696.440	2.315.439.500						1.310.605.277	1.310.605.277
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.368.713	38.968.713	69.600.000	69.600.000	69.600.000	69.600.000	38.968.713	69.600.000	69.600.000	69.600.000	69.600.000	12	34	56	78	100	63.473.743	63.473.743
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	106.390.800	14.330.800	23.030.000	23.000.000	23.030.000	23.000.000	14.330.800	23.030.000	23.000.000	23.030.000	23.000.000	13	35	57	78	100	21.278.160	21.278.160
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	604.227.585	114.162.785	83.490.600	83.490.600	167.541.800	155.541.800	114.162.785	83.490.600	83.490.600	167.541.800	155.541.800	19	33	47	74	100	120.845.517	120.845.517
	Penyediaan alat tulis kantor	335.196.000	80.196.000	60.000.000	60.000.000	75.000.000	60.000.000	80.196.000	60.000.000	60.000.000	75.000.000	60.000.000	24	42	60	82	100	67.039.200	67.039.200
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	227.995.020	20.317.500	35.972.000	35.852.760	100.000.000	35.852.760	20.317.500	35.972.000	35.852.760	100.000.000	35.852.760	9	25	40	84	100	45.599.004	45.599.004
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	25	50	75	100	16.000.000	16.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	264.212.450	36.212.450	37.500.000	37.500.000	115.500.000	37.500.000	36.212.450	37.500.000	37.500.000	115.500.000	37.500.000	14	28	42	86	100	52.842.490	52.842.490
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	1.249.338.677	149.338.677	200.000.000	200.000.000	500.000.000	200.000.000	149.338.677	200.000.000	200.000.000	500.000.000	200.000.000	12	28	44	84	100	249.867.735	249.867.735
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.790.268.640	343.724.320	351.470.400	365.024.640	365.024.640	365.024.640	343.724.320	351.470.400	365.024.640	365.024.640	365.024.640	19	39	59	80	100	358.053.728	358.053.728
	Website	256.608.200	178.933.200	22.675.000	27.500.000		27.500.000	178.933.200	22.675.000	27.500.000		27.500.000	70	79	89	89	100	51.321.640	51.321.640
	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi penyelenggaraan pameran	300.000.000	-	-	-	200.000.000	100.000.000	-	-	-	200.000.000	100.000.000	-	-	-	67	100	60.000.000	60.000.000
	Belanja perangko, materiail dan benda POS lainnya					4.000.000					4.000.000								
	Belanja alat listrik dan elektronika					10.000.000					10.000.000								
	Belanja Peralatan alat kebersihan dan bahan pembersih					10.000.000					10.000.000								

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Pemeliharaan , perawatan dan pengawasan arsip aktif dan in aktif Balitbangda					100.000.000					100.000.000								
	Penerbitan buletin dan jurnal ilmiah sebagai media komunikasi					200.000.000					200.000.000								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.360.692.624	70.346.624	230.096.000	252.625.000	555.000.000	252.625.000	70.346.624	230.096.000	252.625.000	555.000.000	252.625.000						272.138.525	272.138.525
	Pengadaan peralatan gedung kantor	331.146.000	-	44.146.000	43.500.000	200.000.000	43.500.000	-	44.146.000	43.500.000	200.000.000	43.500.000	-	13	26	87	100	66.229.200	66.229.200
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.000.000	-	-	25.000.000	150.000.000	25.000.000	-	-	25.000.000	150.000.000	25.000.000	-	-	13	88	100	40.000.000	40.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	135.166.624	13.621.624	27.225.000	27.160.000	40.000.000	27.160.000	13.621.624	27.225.000	27.160.000	40.000.000	27.160.000	10	30	50	80	100	27.033.325	27.033.325
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan	302.480.000	-	72.000.000	70.240.000	90.000.000	70.240.000	-	72.000.000	70.240.000	90.000.000	70.240.000	-	24	47	77	100	60.496.000	60.496.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	-	20	40	80	100	20.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	65.000.000	-	10.000.000	10.000.000	35.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	35.000.000	10.000.000	-	15	31	85	100	13.000.000	13.000.000
	Penerbitan Buletin Jurnal	226.900.000	56.725.000	56.725.000	56.725.000		56.725.000	56.725.000	56.725.000	56.725.000		56.725.000	25	50	75	75	100	45.380.000	45.380.000
	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
	Fasilitasi manajemen perubahan	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	100	100	40.000.000	40.000.000
	Penerbitan buletin Gerbang BalitbangdaKU	125.000.000	-	-	-	125.000.000	-	-	-	-	125.000.000	-	-	-	-	100	100	25.000.000	25.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	552.890.419	73.781.419	111.109.000	159.000.000	-	209.000.000	73.781.419	111.109.000	159.000.000	-	209.000.000						110.578.084	110.578.084
	Diklat Teknis SDM Aparatur BALITBANGDA	50.000.000	-	-	-		50.000.000	-	-	-		50.000.000	-	-	-	-	100	10.000.000	10.000.000
	Penguatan Perpustakaan	250.781.419	73.781.419	59.000.000	59.000.000		59.000.000	73.781.419	59.000.000	59.000.000		59.000.000	29	53	76	76	100	50.156.284	50.156.284
	Fasilitasi Bekias	252.109.000	-	52.109.000	100.000.000		100.000.000	-	52.109.000	100.000.000		100.000.000	-	21	60	60	100	50.421.800	50.421.800
	Penguatan perpustakaan E-Library					100.000.000					100.000.000								

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3																		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Lomba karya ilmiah remaja (LKIR)					150.000.000					150.000.000								
	Fasilitasi peningkatan SMD					200.000.000					200.000.000								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	240.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000						48.000.000	48.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Balitbangda	240.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000	-	33	67	67	100	48.000.000	48.000.000
		120.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000						24.000.000	24.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	120.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	-	33	67	67	100	24.000.000	24.000.000
		231.505.400	-	77.505.400	77.000.000		77.000.000	-	77.505.400	77.000.000		77.000.000						46.301.080	46.301.080
	Fasilitasi temuan BPK dan Inspektorat	231.505.400	-	77.505.400	77.000.000		77.000.000	-	77.505.400	77.000.000		77.000.000	-	33	67	67	100	46.301.080	46.301.080
	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan					150.000.000					150.000.000								
	Monitoring dan evaluasi kegiatan Balitbangda					300.000.000					300.000.000								
	Inventarisasi BMD Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000				100.000.000					100.000.000							20.000.000	20.000.000
	Fasilitasi study persiapan pembentukan unit pelaksana teknis badan (UPTB) Litbang	3.027.625.948	327.625.948	500.000.000	250.000.000	300.000.000	1.650.000.000	327.625.948	500.000.000	250.000.000	300.000.000	3.000.000.000						605.525.190	875.525.190
	Kajian Penelitian di sub Bidang Ekonomi Daerah	-																-	-
	Kajian ekonomi dan penggunaan pupuk organik dalam usaha tani di Kab. Kukar	200.391.048	200.391.048					200.391.048					100	100	100	100	100	40.078.210	40.078.210
	Kajian ekonomi masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan rencana TAHURA Muara siran Kab. Kukar	500.000.000		500.000.000					500.000.000				-	100	100	100	100	100.000.000	100.000.000
	Kajian Pengembangan Home Industri Minuman dan Makanan Berbahan Baku Buah Naga di Kec. Loa Janan dan Samboja	300.000.000				300.000.000					300.000.000		-	-	-	100	100	60.000.000	60.000.000

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Kajian Pengembangan Industri kecil Pakan Ternak dan Pakan Ikan Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Kajian Penelitian di sub Bidang Pembangunan Daerah	-																-	-
	Kajian sistem tataniaga pemasaran komoditi jagung dan padi	200.000.000			200.000.000					200.000.000			-	-	100	100	100	40.000.000	40.000.000
	Kajian Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun di Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Kab Kukar	-																-	-
	Kajian Pengembangan sarana dan Prasarana Transportasi Sebagai Penunjang Obyek Wisata di Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Kajian Penelitian di sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah	-																-	-
	Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Produktif di Kab. Kutai Kartanegara	-																-	-
	Analisis Strategi Peningkatan PAD di Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang ekonomi dan pembangunan	327.234.900	127.234.900		50.000.000		150.000.000	127.234.900		50.000.000		1.500.000.000	39	39	54	54	513	65.446.980	335.446.980
	Kajian Potensi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Bahan Rencana Penyusunan Pembangunan Daerah					750.000.000					750.000.000								
	Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara					500.000.000					500.000.000								
	Evaluasi Pelaksanaan Program Revolusi Jagung Di Kabupaten Kutai Kartanegara					500.000.000					500.000.000								

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Kajian Pengembangan Jaringan Trayek Transportasi Umum Antar Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara					300.000.000					300.000.000								
	Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Lingkup Pertanian dan Perikanan					500.000.000					500.000.000								
	Kajian Skala Prioritas Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Kutai Kartanegara					500.000.000					500.000.000								
	Kajian Efektifitas Kombinasi Penggunaan Pupuk Organik dan An Organik pada Tanaman Padi Sawah Terhadap Pendapatan Petani					750.000.000					750.000.000								
	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Sebagai Penunjang Obyek Wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara					500.000.000					500.000.000								
	Kajian Peran Serta Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara					500.000.000					500.000.000								
	Kajian Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun di Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun					500.000.000					500.000.000								
		2.633.063.000	283.063.000	500.000.000	250.000.000	-	1.600.000.000	283.063.000	500.000.000	250.000.000	-	1.600.000.000						526.612.600	526.612.600
	Kajian Penelitian di sub Bidang Sosial Budaya	-																-	-
	Kajiansosial budaya masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan rencana TAHURA Muara siran Kab. Kukar	500.000.000		500.000.000					500.000.000				-	100	100	100	100	100.000.000	100.000.000
	Kajian Fenomena Aliran dan Penyebaran BAHAI di Kabupaten Kutai Kartanegara	-																-	-
	Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal dalam memenuhi kebutuhan Dunia Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Kajian Penelitian di sub Bidang Kemasyarakatan	-																-	-
	Kajian efektivitas gerakan mengaji terhadap pemberantasan buta aksara Al-Quran	202.300.000	202.300.000					202.300.000					100	100	100	100	100	40.460.000	40.460.000
	Kajian Kebutuhan dan harapan Masyarakat Terhadap Pelayanan di puskesmas	-																-	-
	Kajian Strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Budaya Lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Kajian Penelitian di sub Bidang Sejarah dan Perpurbakalaan	-																-	-
	Kajian penelusuran sejarah kerajaan kutai martadipura	200.000.000			200.000.000					200.000.000			-	-	100	100	100	40.000.000	40.000.000
	Kajian Penyelenggaraan Erau dan Pengaruhnya ditinjau dari perspektif Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat Kutai Kartanegara	-																-	-
	Kajian peranan Lembaga Adat dalam meningkatkan Motivasi, Pengetahuan dan Keterampilan Msyarakat terhadap seni Budaya	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang sosial budaya dan kemasyarakatan	230.763.000	80.763.000		50.000.000		100.000.000	80.763.000		50.000.000		100.000.000	35	35	57	57	100	46.152.600	46.152.600
	Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara					600.000.000					600.000.000								
	Kajian Penggalian Situs Cagar Budaya Di Kec. Muara Kaman					500.000.000					500.000.000								
	Kajian Penyebaran Aliran Baha'i Di Kabupaten Kutai Kartanegara					200.000.000					200.000.000								
	Pembuatan Biografi Aji Muhamad Sulaiman					300.000.000					300.000.000								

[illegible]

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Kajian Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kab.kutai kartanegara	450.000.000					450.000.000					450.000.000	-	-	-	-	100	90.000.000	90.000.000
	Kajian Penelitian di sub Bidang Aparatur	-																-	-
	Surve indeks partisipasi masyarakat (IPM) di Kab. Kukar	200.000.000			200.000.000					200.000.000			-	-	100	100	100	40.000.000	40.000.000
	Kajian Kinerja Aparatur Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan Di Pemkab. Kutai Kartanegara	-																	
	Kajian Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Umum Terhadap Peningkatan Kinerja Pejabat Struktural SKPD Di Kab.Kukar	250.000.000					250.000.000					250.000.000	-	-	-	-	100	50.000.000	50.000.000
	Kajian Penelitian di sub Bidang Pemerintahan	-																-	-
	Kajian tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen berdasarkan Perda No.6 Tahun 2012	200.000.000			200.000.000					200.000.000			-	-	100	100	100	40.000.000	40.000.000
	Kajian Implementasi Perbup no.35 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan desa kab.kukar	-																	-
	Kajian implementasi peraturan daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	250.000.000					250.000.000					250.000.000	-	-	-	-	100	50.000.000	50.000.000
	Studi Kelayakan Naskah Akademik Persiapan Kabupaten Kutai Tengah																		
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang penelitian	150.000.000			50.000.000		100.000.000			50.000.000		100.000.000	-	-	33	33	100	30.000.000	30.000.000
	Kajian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara					450.000.000					450.000.000								

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Kajian Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara					300.000.000					300.000.000								
	Kajian Pemetaan ASN dan Non ASN Dalam Rangka Mendukung Profesionalisme Aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara					350.000.000					350.000.000								
	Kajian Regulasi Daerah tentang Tunjangan Tenaga Medis dan Para Medis Di Kabupaten Kutai Kartanegara					350.000.000					350.000.000								
	Kajian Strategis Penguatan Program Padu-Desk (Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan) Di Kabupaten Kutai Kartanegara					400.000.000					400.000.000								
	Kajian Optimalisasi Penerapan Regulasi Terkait Kemudahan Investasi Daerah					350.000.000					350.000.000								
	Survey Indeks Persepsi Korupsi Di Kabupaten Kutai Kartanegara					400.000.000					400.000.000								
	Kajian Peran Kecamatan Dalam Pemanfaatan Dana CSR/TJSP Di Kabupaten Kutai Kartanegara					300.000.000					300.000.000								
	Kajian Pengembangan Desa Tertinggal Sebagai Upaya Menuju Pembangunan Desa Mandiri					400.000.000					400.000.000								
	Kajian Survey Indeks Kemandirian Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara					400.000.000					400.000.000								
	Program Inovasi Daerah	4.532.817.448	197.939.900	584.877.548	350.000.000	600.000.000	2.800.000.000	197.939.900	584.877.548	350.000.000	600.000.000	2.800.000.000						906.563.490	906.563.490
	Kajian Inovasi di sub Bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah	-																-	-
	Kajian karakteristik verietas jelai (coix lacymajobi) sebagai plasma nutfah tanaman pangan alternatif di Kab. Kukar	197.939.900	197.939.900					197.939.900					100	100	100	100	100	39.587.980	39.587.980

[illegible]

No	Uraian	2016-2021	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi mdan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp						Rp
	Kajian Pemanfaatan Lahan Marginal dengan Tanaman Galam di Kabupaten Kutai Katanegara	1.100.000.000				600.000.000	500.000.000				600.000.000	500.000.000	-	-	-	55	100	220.000.000	220.000.000
	Kajian uji adaptasi benih kelapa sawit pada lahan pasca tambang di kabupaten kutai kartanegara	350.000.000					350.000.000					350.000.000	-	-	-	-	100	70.000.000	70.000.000
	Kajian Inovasi di sub Bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah	-																-	-
	Kajian Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dalam rangka pemetaan potensi pajak daerah di kab. Kukar	-																-	-
	Kajian Agroindustri Jagung Dalam Rangka Mendukung Program Revolusi Jagung di kab. Kukar	-																-	-
	Kajian diversifikasi pemanfaatan tanaman jagung di kab. Kukar	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Kajian Inovasi sarana pendukung destinasi wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000					500.000.000					500.000.000	-	-	-	-	100	100.000.000	100.000.000
	Riset cepat isu startegis dan isu aktual bidang teknologi	234.877.548		84.877.548	50.000.000		100.000.000		84.877.548	50.000.000		100.000.000	-	36	57	57	100	46.975.510	46.975.510
	Penyusunan rencana induk kelitbangan					500.000.000					500.000.000								
	Uji adaptasi tanaman jelai (coix lacryma jobi L) hasil seleksi karakteristik agronomis					450.000.000					450.000.000								
	Pemutihan varitas padi lokal sebagai plasma nutfah di Kabupaten Kutai Kartanegara					400.000.000					400.000.000								
	Identifikasi Pendaftaran dan Usulan Pelepasan Varietas Buah Lai					400.000.000					400.000.000								
	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (Naskah Akademik)					450.000.000					450.000.000								

[illegible]



Dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar 2021 – 2026 terdapat sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Sasaran-sasaran tersebut diidentifikasi dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun, adapun sasaran direncanakan sebagaimana tergambar pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran yang ingin Dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Periode Renstra 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Melaksanakan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/satuan kerja	
Meningkatkan sarana dan prasarana dan Tatalaksana pendukung kerja yang memadai	• Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai bagi pelaksanaan kerja organisasi • Terpeliharanya sarana prasarana organisasi
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Terpenuhinya kebutuhan tenaga jabatan fungsional peneliti yang memadai • Meningkatnya kapasitas keilmuan dan kompetensi pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan pegawai
Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Menyusun Program dan Kegiatan Sesuai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	• Terwujudnya pelayanan keuangan yang lebih cepat dan akurat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, • Terwujudnya sinergi antar program, merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal secara optimal	• Terwujudnya koordinasi internal dan lintas lembaga yang efektif
Misi 2 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah	
Menghasilkan rekomendasi kebijakan	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di



yang berkualitas di Penyelenggaraan Pemerintahan	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelembagaan sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan desa	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan sesuai kebutuhan desa, • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub bidang Pemerintahan desa
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang data dan Pengkajian Peraturan	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Aparatur sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang data dan Pengkajian peraturan
Misi 3 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang <i>Ekonomi dan Pembangunan Daerah</i>	
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Ekonomi Daerah	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang ekonomi sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan daerah, • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup



Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Pengembangan wilayah , Fisik dan Prasarana sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
Misi 4 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang <i>Inovasi Daerah</i>	
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Teknologi dan Inovasi	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Teknologi dan Inovasi sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Teknologi dan Inovasi
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Desiminasi Kelitbangan	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Desiminasi Kelitbangan sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Desiminasi Kelitbangan sesuai kebutuhan daerah
Misi 5 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang <i>Sosial Budaya dan Kemasyarakatan</i>	
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Sosial Budaya	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Sosial Budaya sesuai kebutuhan daerah



	• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Sosial Budaya oleh Pemerintah Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Kependudukan	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Kependudukan sesuai kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Kependudukan
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Tersedianya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat kebutuhan daerah • Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah.
Misi 6 : Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, informasi serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset dan perumusan kebijakan daerah	
Menyediakan informasi dalam bentuk <i>data base</i> potensi daerah	• Tersedianya <i>data base</i> daerah
Menghasilkan publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan	• Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan

(Sumber : Penyusunan Program dan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021).

Dalam upaya pencapaian masing-masing sasaran yang telah diurai diatas, jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain.



Bentuk-bentuk kontribusi utama yang dihasilkan dari berbagai perwujudan sasaran terhadap pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan ke dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kontribusi utama yang akan diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah menghasilkan rekomendasi guna mendukung kebijakan sesuai kebutuhan daerah yang terdiri dari :

- a) **Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** dengan indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran, Program (outcome) presentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah lainnya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- b) **Bidang Sosial dan Kependudukan** dengan indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran, Program (outcome) presentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah lainnya Bidang Bidang Sosial dan Kependudukan Penyelenggaraan Bidang Sosial dan Kependudukan.
- c) **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dengan indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran, Program (outcome) presentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah lainnya Bidang Penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- d) **Bidang Inovasi dan Teknologi** dengan indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran, Program (outcome) presentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah lainnya Bidang Penyelenggaraan Bidang Inovasi dan Teknologi.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdiri atas :

- **Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** uraian objek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** Uraian obyek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- **Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah** Uraian obyek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** Uraian obyek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang Udangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah** Uraian obyek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Penataan Arsif Dinamis pada SKPD
 - 6) Penyediaan Bahan Material
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** Uraian obyek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah** Uraian obyek Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan.



- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2016 - 2021 sebelumnya telah dapat terlaksana dengan baik, dengan tingkat pencapaian rata-rata yaitu 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat, apalagi jika dibandingkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang masih ada. Selain ditinjau dari pencapaian sasaran rata-rata program dan kegiatan, perkembangan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, berbanding lurus dengan realisasi penyerapan anggaran yang mengalami peningkatan yang signifikan pula. Penyerapan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 jika dirata-ratakan, tiap tahunnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berhasil menyerap anggaran sebesar 87,6 persen dari total pagu yang dimilikinya. anggaran terbesar yang diperoleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 14.601.302.325.50,-. Sedangkan Realisasi penyerapan anggaran terbesar pada tahun 2020 sebesar 87,13% sedangkan terendah ditahun 2018 sebesar 85.16 % yang disebabkan adanya Rasionalisasi Anggaran pada tahun tersebut. Perkembangan kinerja anggaran dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran	Besaran Anggaran		
	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	12.715.350.381,50	11.462.975.879,-	90,15
2017	12.352.378.061,92	10.519.378.681,-	85,16
2018	11.738.009.298,88	9.072.892.087,-	77.29
2019	14.387.088.873,15	12.581.227.174,-	97.03
2020	14.601.302.325,50	12.722.514.754,-	87,13



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Kutai Kartanegara IDAMAN sebagai *grand strategy* pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui KUKAR IDAMAN penataan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga lebih dimatangkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perangkat Daerah serta Permendagri nomor 050 - 3708 tentang pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dengan jelas menggambarkan makin luasnya cakupan Penelitian dan Pengembangan, 43 (empat puluh tiga) sub Kegiatan bukan hal yang mudah. Apalagi saat ini terjadi musibah dunia Pandemi Covid - 19 yang meluluhlantakkan semua sektor terutama sektor ekonomi, kita harus siap hidup berdampingan dengan virus Covid - 19.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program KUKAR IDAMAN (2021 - 2026), dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini merupakan tantangan dalam proses penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah diantaranya adalah :

1. *Good governance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 (KUKAR IDAMAN) yang tercantum dalam RPJMD 2021 - 2026;
3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil Penelitian dan Pengembangan;
4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;



5. Hasil-hasil / *outcome* penelitian yang belum maksimal diimplementasikan oleh OPD – OPD yang ada;
6. Belum terealisasinya Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB)
7. Belum tersedianya Sarana (alat), laboratorium, guna mendukung penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Riset Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa yang sebagian besar belum memadai;
9. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan sangat kecil
10. Mindset SDM aparatur yang belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan, minimnya Diklat untuk Peneliti Fungsional dan calon peneliti fungsional.

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Peningkatan SOTK dari pola minimal ke pola maksimal dengan penambahan 2 Kepala Bidang dan perubahan nomenklatur Sub Bidang pada masing-masing bidang, sehingga tugas dan fungsi dapat terbagi dan kejelasan masing-masing tugas pokok dan fungsi sangat nampak;
2. Beberapa program kegiatan yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik;
3. Beberapa program kegiatan yang baru sebagai tindak lanjut dari mengatasi kendala yang ada, disamping kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk menghantarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Dukungan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan pelaporan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
5. Jaringan networking kelitbangan yang terbangun cukup luas;
6. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Penelitian ;
7. Kepercayaan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.



Disamping tantangan dan Peluang tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa kelemahan yang dihadapi dalam Penelitian dan Pengembangan organisasi kedepan, antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan baik dari segi kuantitas, maupun kualitas;
2. Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan Pejabat Struktural dan Fungsional Umum;
3. Kurangnya Pembinaan dan Peningkatan kapasitas sumber daya fungsional melalui pendidikan dan pelatihan substansi maupun keterampilan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan masih belum prioritas sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi yang dihasilkan;
4. Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi/OPD lainnya, baik Litbang Pemerintah (Badan Litbang Kementerian, Badan Litbang Provinsi, Lembaga Litbang yang melekat di Perguruan Tinggi, Akademisi) maupun dengan Litbang swasta saat ini masih belum ada yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama Kelitbangan.
5. Anggaran yang masih kurang mendukung pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. UPTB dan Sarana Laboratorium Kelitbangan masih belum tersedia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa Kekuatan untuk menghadapi Penelitian dan pengembangan organisasi kedepan, antara lain yaitu:



1. Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah,
12. Surat Edaran Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri nomor 050 - 3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah,
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah No.12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Belum tersediannya rekomendasi yang menjadi salah satu bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Renstra tidak seluruhnya dapat difasilitasi dalam hal penganggaran
		Rekomendasi yang dihasilkan tidak semuanya termanfaatkan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan yang disusun belum sepenuhnya terkoordinasi dengan kebutuhan perangkat daerah lainnya
		Jumlah Jabatan Fungsional Peneliti yang tersedia belum sesuaidengan kebutuhan Jabatan	Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti berkurang dikarenakan terjadi mutasi / pindah ke jabatan struktural



		Fungsional peneliti berdasarkan kepakaran	
			Rendahnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional peneliti
			Peningkatan Kapasitas kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya dapat difasilitasi (Peningkatan SDM)
2.	Terbatasnya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung kelengkapan atau referensi perumusan kebijakan yang diperlukan pemengku kepentingan	Publikasi ilmiah yang ada belum memenuhi standar akreditasi secara nasional	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan publikasi mandiri dan berkala
		Belum termanfaatkannya publikasi mandiri dan berkala oleh masyarakat	Kurangnya sosialisasi manfaat publikasi mandiri dan berkala

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran Renstra PD.
- Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi.



- Kolom (4) diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan.

Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang belum memadai;
- (2) Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
- (3) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (4) Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- (5) Hasil Rekomendasi Penelitian belum Operasional dan belum maksimal dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD terkait.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah “ **Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Sejahtera dan Bahagia** ”

Sedangkan **Misi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

- 1) Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani



- 2) Meningkatkan pembangunan Sumber daya Manusia yang berakhlak mulia, Unggul dan Berbudaya
- 3) Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur dasar dan Konektivitas Wilayah
- 5) Meningkatkan pemngelolaan sumber daya alam yang bewawasan lingkungan

Guna mendukung Visi dan Misi kepala daerah terpilih maka dibuat an dijabarkan dalam 23 (duapuluh tiga) Program Dedikasi antara lain :

1. Program Digitalisasi Pelayanan Publik
2. Program Aparatur Negara Bahagia
3. Program Kukar Bebaya
4. Program 1.000 guru sarjana
5. Program Kukar Berkah
6. Program Beasiswa KUKAR IDAMAN
7. Program Keluarga Peduli Kesehatan
8. Program Kukar siap Kerja
9. Program Kukar Berbudaya
10. Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN “ GEMA IDAMAN “
11. Program Kesejahteraan Sosial “ IDAMAN “
12. Program Pertanian berbasis Kawasan
13. Program hilirisasi Pertanian
14. Program Kukar Kaya Festifal (K3F)
15. Program Usaha Kecil “ IDAMAN “
16. Program Kukar Kreatif “ IDAMAN “
17. Program pementapan Konektivitas Wilayah
18. Program Program Fasilitas Perumahan Rakyat
19. Program air Bersih Desa
20. Program Terang Kampongku
21. Program Desa Ramah Lingkungan
22. Program Kukar Peduli Lingkungan



23. Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan KUKAR IDAMAN, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih proporsional sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026.

Berbagai program unggulan tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian Misi KUKAR IDAMAN dengan cara memberdayakan semua potensi yang ada di OPD, melakukan koordinasi lintas OPD dan Lintas Kewilayahan. Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka merupakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga *think-tank* untuk mengawal dan mempercepat perwujudan Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada dasarnya siap dan mendukung dengan sepenuh hati melaksanakan program tersebut, Hal ini dikarenakan ruang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mencakup seluruh sendi strategis Pembangunan Daerah yang memerlukan dukungan Riset dan Inovasi. Dari misi yang telah ada, maka Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Misi Bupati diantaranya adalah Penelitian terkait, sebagai berikut :



RPJMD Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	Sasaran	Strategi
Misi Pertama : <i>Memantapkan Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani</i>	1) 15 Survey indeks sebagai data dukung (IDSD) 2) Peningkatan kemampuan Peneliti Fungsional dan Non Fungsional 3) Peraturan Daerah (PERDA) Peraturan Bupati (Perbup) yang tidak sesuai dengan kemajuan Pembangunan 4) Pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Desa	1. Meningkatkan ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data (kajian Kinerja Pelayanan Publik) 2. Memantapkan Refomasi birokrasi dengan memaksimalkan SDM, mengadakan Diklat Peneliti Fungsional dan Non Fungsional) 3. Membantu Pemerintah Daerah dalam pembuatan Draft Payung Hukum (regulasi) atas Perda, Perbup yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan 4. Melakukan 15 Survey Indeks Partisipasi Masyarakat guna mendukung Indeks Daya Saing Daerah 5. Studi Kelayakan Penataan Wilayah Kecamatan. Kelurahan dan Desa



		6. Menyusun Naskah Akademik Perda
Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan Sumber daya Manusia yang berakhlak mulia, Unggul dan Berbudaya	1) Bantuan / Hibah ke Pesantren, Beasiswa Santri 2) Pendidikan Vokasi 3) Gerakan Mengaji 4) Smart City 5) Karya Ilmiah 6) Inovasi Daerah 7) Indeks Daya Saing Daerah 8) Tanaman Endemik	1. Draft Perbup Hibah bantuan ke Pesantren dan Beasiswa Santri 2. Lanjutan Kajian Pendidikan Vokasi 3. Kompilasi aplikasi Layanan Publik dalam rangka Tenggarong sebagai salah satu kota Smart City 4. Lomba Karya Ilmiah Remaja dan Kaum Milenial 5. Lomba Inovatif Goverment Award (IGA), 6. Inovasi Desa/Kelurahan, Inovasi Perempuan, Inovasi UMKM 7. Mengikuti Lomba IDSD 8. Kajian Racun Upas/Sumpit untuk Bahan Pestisida 9. Kajian Buah Lai sebagai bahan Alternatif Farmakologi dan Kosmetik 10. Kajian Pemanfaatan tanaman kaliandra sebagai pakan ternak (UMM) malang,



Misi Ketiga : Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengelolaan air bersih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2. Aset Daerah yang tidak produktif 3. Situs Kerajaan, situs Purbakala, Situs Budaya 4. Plasma Nutfah Padi 5. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 6. IRT Gula merah, Hutan Desa Pinang Habang desa Tuana Tuha	1) Draft Perbup Tatakelola Pembinaan BUMDes 2) Kajian Pemanfaatan Aset Daerah 3) Penelitian/Kajian Situs Kerajaan di Jembayan, Kutai lama, Kota Bangun 4) Kajian situs desa Bunga Jadi Muara Kaman 5) Lajutan Kajian 17 varietas Plasma Nutfah padi lokal 6) Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 7) Pendampingan Peraturan Desa pengelolaan destinasi wisata desa Pinang Habang 8) Pendampingan pengelolaan, Pengolahan, pemasaran IRT gula merah
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah	1) Fasilitas Master Plan sarana dan Prasarana Pemekaran kecamatan, Desa/Kelurahan 2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar Kesehatan 3) Fasilitas kecamatan, desa/kelurahan sebagai penyangga pangan Ibu Kota	1. Fasilitas kajian kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana Kec. Kota Bangun Darat dan Kec. Samboja Barat serta penataan desa persiapan 2. Kajian Kebutuhan Fasilitas Kesehatan



	Negara (IKN) 4) Perlindungan Lahan Pertanian	Tingkat Pertama dalam rangka IKN 3. Kajian penyediaan kebutuhan pangan kecamatan dan desa dalam rangka IKN 4. Fasilitasi Draft PERDA Perlindungan Lahan Pertanian
Misi Kelima : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	5) Pemanfaatan Lahan Eks tambang 6) Desa Ramah Lingkungan 7) Pemanfaatan limbah pabrik pertanian 8) Fasilitasi Hutan Mangrop kawasan pesisir 9) Fasilitasi pulau-pulau kecil dan pulau terluar	1. Kajian Pemanfaatan Tanaman Kaliandra sebagai bahan bangunan dan pakan ternak dilahan Eks tambang 2. Fasilitasi desa ramah lingkungan di kec. Muara Kaman 3. Fasilitasi Road Map Reboisasi hutan Mangrop/Bakau sebagai perlindungan kawasan perikanan dan Destinasi wisata 4. Fasilitasi Kajian Pulau-pulau kecil dan terluar

Berdasarkan 5 (lima) Misi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu OPD Pendukung dalam pencapaian keseluruhan Misi tersebut dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal



guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mewujudkan Misi sekaligus Visi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi dan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Timur

Demi tercapainya sinergitas kegiatan kelitbangan serta *outcome* yang luas, maka penyusunan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi sebagai ujung tombak pengembangan dunia Kelitbangan di tanah air. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan Iptek Nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting, karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang diambil.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi, maka pembangunan Iptek ke depan harus diarahkan kepada peningkatan kontribusi Iptek secara langsung dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan Negara. Sehingga dilahirkanlah Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek 2021 – 2026 yaitu “Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban”

Deskripsi Iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan kemajuan Iptek Nasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian Bangsa. Kemajuan Iptek mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi Iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan dengan kemajuan Iptek Nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil-hasil Litbang harus mencerminkan *academic excellence*, mempunyai *economic value*, dan memberikan *social impact* yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara.



Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu:

1. Memperkuat daya dukung Iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia.
2. Meningkatkan Penelitian, Pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.

Urgensi untuk Pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian Iptek Nasional. Iptek yang dimaksud adalah Iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang.

Kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui: (1) Kelembagaan iptek yang efektif, (2) Sumberdaya iptek yang kuat, (3) Jaringan antar-kelembagaan iptek yang saling memperkuat (mutualistik), (4) Relevansi dan produktivitas Iptek yang tinggi, dan (5) Pendayagunaan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset dan Teknologi, rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga perlu memperhatikan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk saling *men-support* dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi.

Dalam rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa visi Badan Penelitian dan



Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kegiatan Penelitian dan Pengembangan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan stakeholders.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Penelitian dan Pengembangan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pemanfaatan hasil-hasil (rekomen-dasi) Litbang.
5. Meningkatkan Sumberdaya Manusia / Sumberdaya Aparatur

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa strategi pembangunan. Adapun strategi yang fokus pada Penelitian dan Pengembangan ditegaskan dalam strategi 6 yaitu Penelitian dan Pengembangan IPTEK; strategi 7 yaitu Pemanfaatan dan penggunaan hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan strategi 8 yaitu Peningkatan dan penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari strategi-strategi tersebut kemudian diuraikan ke dalam beberapa arah kebijakan yang sangat penting dalam menguatkan posisi kelitbangan di daerah. Adapun arah kebijakan dalam strategi 6 yaitu :

1. Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpercaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, pengembangan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.



2. Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu
3. Peningkatan mutu sumberdaya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pengembangan dan penguatan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan arah kebijakan dalam strategi 7 yaitu :

1. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
2. Pemanfaatan penerapan hasil penelitian serta pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien
3. Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah, dan tanpa hambatan

Selanjutnya arah kebijakan dari strategi 8 yaitu Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga litbang dalam penelitian pembangunan; dan Peningkatan kerjasama bidang Penelitian dan Pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

Keseluruhan arah kebijakan tersebut di atas ditetapkan dalam rangka meningkatkan Penelitian dan Pengembangan IPTEK di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta pemanfaatan penggunaan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Seperti diketahui bahwa dokumen Renstra Kelitbang diperlukan untuk memberikan penguatan sekaligus menjamin kualitas kebijakan di tataran Pemerintahan Daerah. Melalui Renstra Kelitbang ini akan diperoleh kejelasan arah dan kepastian waktu dalam upaya menuju penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, melalui Renstra Kelitbang dapat dipastikan tersusunnya kebijakan Pemerintah yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai strategi pembangunan nasional yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi Pemerintah maka



Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, arah kebijakan strategis pengembangan kelitbangan baik pusat, provinsi, maupun daerah dapat saling menunjang demi peningkatan dan kemajuan daerah dan bangsa.

Arah kebijakan strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya secara implisit telah diungkapkan dalam beberapa Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, namun tetap disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan serta kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Ketiga aspek tersebut harus mampu diintegrasikan dalam menyusun kegiatan kelitbangan daerah sehingga pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/



ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Saat ini harus diakui bahwasanya peran sumber daya alam sangat penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah ke depan. Tingginya peran sumber daya alam dalam perekonomian daerah telah memicu pola produksi yang eksploitatif dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

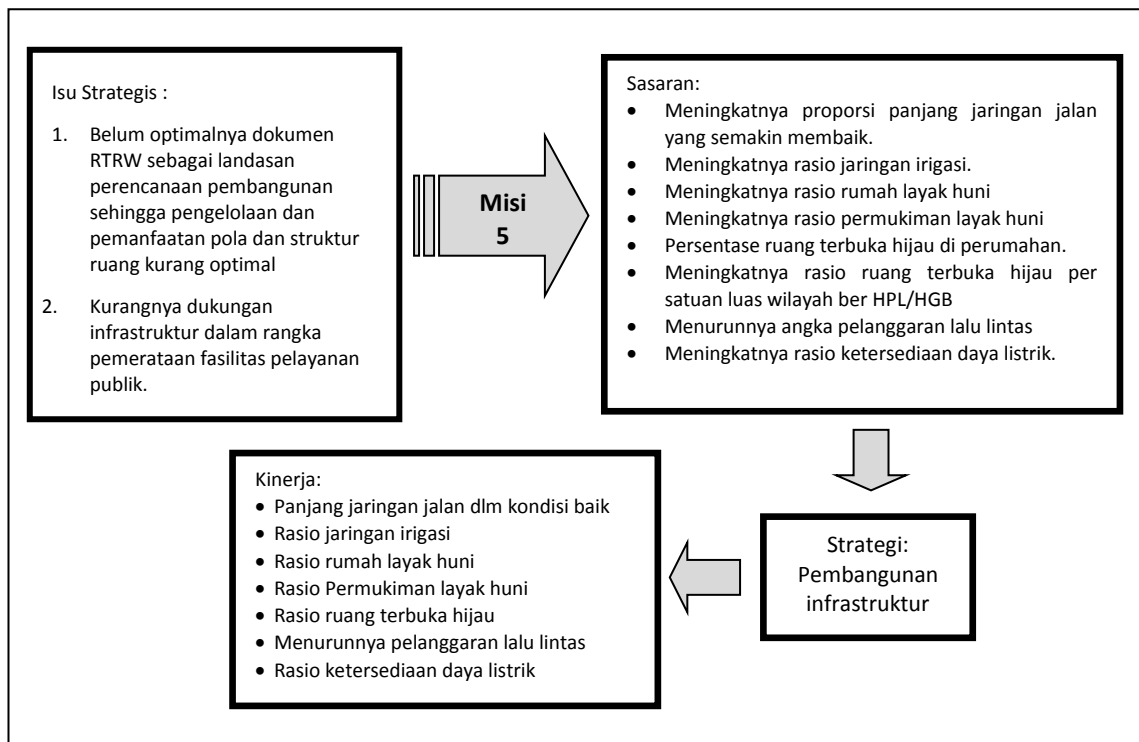
Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengimplementasikan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan serta solusi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Unsur penting lainnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah hendaknya memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Keserasian dengan RTRW ini sangat penting sebab RTRW memetakan wilayah-wilayah yang bisa dan tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dengan pertimbangan kelestarian lingkungan. Sehingga peran ganda sumber daya alam, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan dapat berjalan dengan baik.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, sebagaimana yang tercantum dalam Misi 5 di RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan publik. Oleh Karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu memperhatikan kondisi ini dengan instrumen pembangunan infrastruktur untuk mengintegrasikan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pengurangan

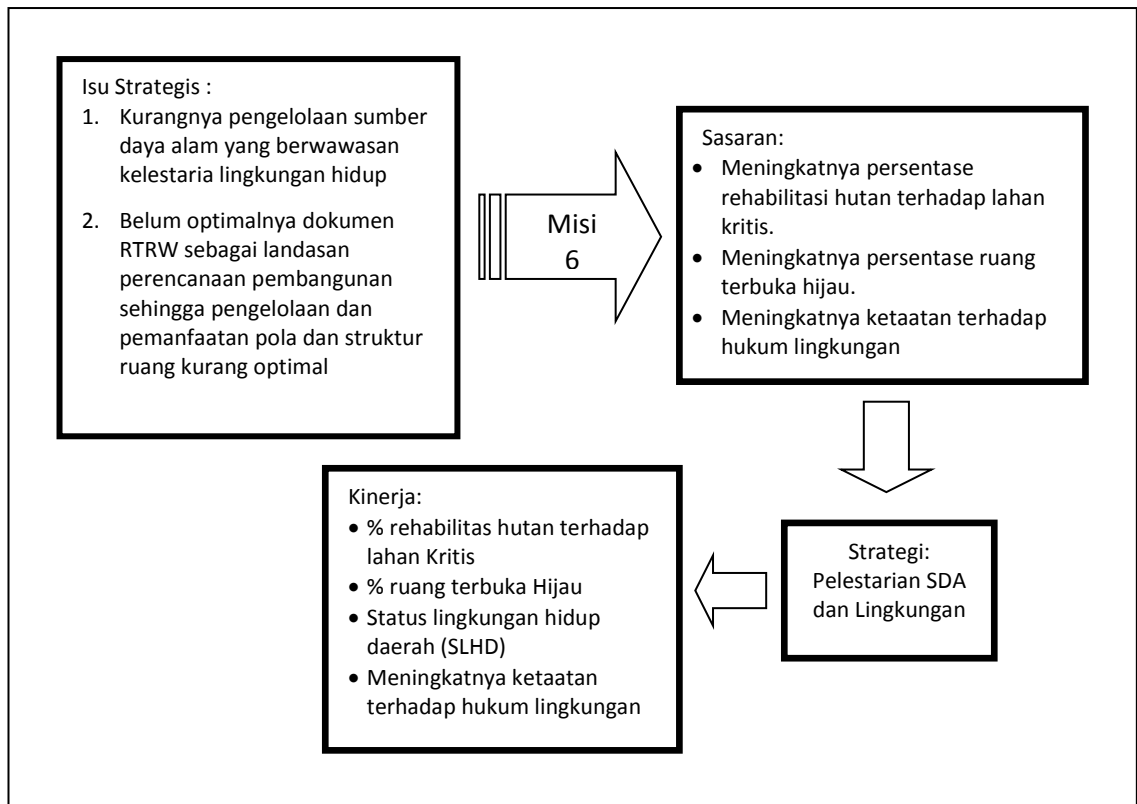


kesenjangan pelayanan dan sebagai pembuka keterisolasian antar wilayah, sebagaimana tersaji pada gambar 3.1 berikut ;



Gambar 3.1 Strategi Pembangunan Infrastruktur

Hal utama yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Misi ke-6 diuraikan bahwa diperlukan untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dengan demikian, sasaran kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada langkah-langkah pelestarian lingkungan hidup, seperti terlihat dalam Gambar 3.2 berikut ;



Gambar 3.2 Pelestarian SDA dan Lingkungan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, yaitu:

1. Pemahaman akan tugas dan fungsi kelitbangan dalam tubuh organisasi masih kurang dapat dipahami dan diinternalisasi secara optimal oleh sebagian aparaturnya. Dorongan dan upaya untuk melakukan inovasi dan kegiatan-kegiatan yang sarat unsur kelitbangan masih minim dilakukan. Kondisi ini tentu mempengaruhi output yang dihasilkan serta pencapaian kualitas yang tinggi terhadap hasil-hasil kelitbangan. Kenyataan ini cukup paradoks dengan komitmen kepala daerah yang secara tegas telah mengeluarkan kebijakan agar semua kegiatan kelitbangan perlu dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Terbatasnya jumlah tenaga fungsional peneliti dan perekayasa dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis kelitbangan daerah. Masih kurangnya minat aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



untuk menjadi tenaga fungsional peneliti dan perekayasa menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan yang tentu sangat membutuhkan peran tenaga fungsional tersebut.

3. Jaringan kelitbangan yang perlu semakin diperkuat dan dioptimalkan kemanfaatannya. Saat ini jaringan kelitbangan (Jarlitbang) antar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan lembaga litbang lainnya telah terbangun, namun dirasakan bahwa peran Jarlitbang ini masih kurang dimanfaatkan terutama terkait kerjasama dan koordinasi kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan.
4. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelitbangan turut mempengaruhi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah saat ini. Unsur penunjang tersebut utamanya adalah belum tersedianya laboratorium IPTEK dan infrastruktur TIK yang masih minim.
5. Pandemi Covid - 19 yang saat ini masih melanda seluruh dunia mengakibatkan melemahnya semua sektor kehidupan, tingginya angka kematian akibat covid - 19, sehingga RPJMD yang sudah disusun harus di revisi, tugas Balitbangda selaku Perangkat Daerah Pendukung perlu dimaksimalkan, paling tidak dapat memberikan masukan kepada kepala daerah untuk mengambil kebijakan strategis.

3.5.1. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan

Isu dan permasalahan Penelitian dan Pengembangan Daerah lima tahun ke depan lebih menekankan pada:

1. Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta masih besarnya aspek dan potensi kelitbangan yang belum tersentuh oleh kegiatan-kegiatan kelitbangan menjadi catatan tersendiri bagi optimalisasi peran unit litbang daerah;
2. Perkembangan tingkat pendidikan masyarakat tentu mempengaruhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama pada aspek pelayanan publik yang lebih bermutu dan prima. Kondisi ini tentu membutuhkan kajian/ penelitian yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu perlu disikapi oleh lembaga litbang dengan menciptakan terobosan-terobosan yang dapat semakin mengefektifkan dan mengefisienkan pola kerja atau proses kerja Pemerintahan Daerah;



4. Isu-isu Nasional dan Global seperti perubahan iklim (*climate change*) dan perdagangan bebas tentu menjadi bahan masukan bagi lembaga litbang dalam mempersiapkan kebijakan preventif dalam menghadapinya serta mengupayakan dukungan penguatan daya saing daerah;
5. Semakin terbatasnya sumber daya alam Kutai Kartanegara akibat adanya illegal logging, pembukaan areal perkebunan dan pertambangan yang tidak mengindahkan konservasi lingkungan membutuhkan formulasi kebijakan yang dirancang melalui proses penelitian/ kajian yang komprehensif terutama dalam hal tata ruang daerah untuk melindungi aset daerah berupa kekayaan alam tersebut;

3.5.2. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam konteks manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini, identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarnya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, Analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi – atau unit organisasi – dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya (Rangkuti, 1998).



Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan internal (Analisis Lingkungan Internal, ALI) yang meliputi kekuatan (*strength*) serta kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan eksternal (Analisis Lingkungan Eksternal, ALE) yang meliputi peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable*. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.

3.5.2.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi mutlak dilakukan karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarnya. Identifikasi dan penilaian faktor lingkungan organisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Penggunaan analisis SWOT guna mencermati kondisi organisasi baik internal maupun organisasi relevan untuk dilakukan. Hasil analisis sebelumnya di **tahun 2019** mencermati bahwa **kekuatan** (*strength*) yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara pada landasan hukum yang kuat akan organisasi, yakni Adanya Peraturan Perundang-undangan (Perda No.18/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang strategis serta cukup tersedianya dana dan sarana prasarana pendukung, sementara organisasi juga menyadari akan cukup banyaknya **kelemahan** (*weakness*) berupa struktur organisasi yang belum mapan, kualitas serta kuantitas SDM aparatur yang masih belum memadai serta belum optimalnya fungsi perencanaan program termasuk belum tersedianya data base sebagai penunjang tugas-tugas penelitian dan pengembangan. Faktor eksternal yang bersifat *uncontrollable* yang dicermati menjadi peluang yang harus ditangkap oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar berupa kebijakan/*goodwill*/dukungan Bupati terhadap eksistensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, perkembangan IPTEK, serta potensi sumber daya alam



daerah. Faktor yang disadari akan menjadi ancaman bagi perkembangan/perbaikan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi lemahnya koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan, globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi, serta belum memasyarakatnya kelembagaan dan program Litbang.

Berbagai perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi menyebabkan terjadi beberapa pergeseran terhadap faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi :

Lingkungan Internal

Untuk mendukung profesionalisme lembaga litbang, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah pembenahan internal oleh lembaga litbang sendiri.

Peraturan daerah No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah. Dukungan peraturan ini menguatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, serta melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah. Domain litbang semakin kuat dengan perlunya naskah akademik (*academic paper*) disusun sebelum penetapan Peraturan-Peraturan Daerah, Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan (internal) yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Faktor lain yang juga menjadi kekuatan (*strength*) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah posisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai *leading sector* koordinasi perencanaan kegiatan kelitbang daerah. Aspek perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan. Proses penyusunan perencanaan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat/aspirasi masyarakat luas dan berdasar pada hasil



penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹ Ini menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk melakukan kegiatan riset unggulan daerah yang merupakan kemitraan lembaga litbang, industri dan pemerintah. Dan posisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, berdasar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 menjadi *leading sector* koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kewenangan yang cukup besar ini juga didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai yang masih disadari sebagai kekuatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas kelitbangan.

Upaya optimalisasi peran litbang tentunya harus didukung dengan kualitas (serta kuantitas) SDM aparatur khususnya aparatur kelitbangan yang memadai. Namun, organisasi menyadari bahwa hingga saat ini salah satu kelemahan yang harus segera diminimalisir adalah pada aspek SDM khususnya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa yang masih belum optimal. Hingga tahun 2017 ini, jumlah tenaga peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar hanya sebanyak 4 (empat) orang dan belum memiliki tenaga fungsional perekayasa yang tentu sangat urgen dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kelitbangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah tenaga fungsional ini masih sangat kurang untuk mendukung upaya optimalisasi peran litbang daerah. Mindset SDM yang belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan juga menjadi penghambat/kelemahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Mindset SDM kelitbangan untuk kritis menganalisis, berpikir ilmiah masih perlu 'dipupuk' untuk mendukung perbaikan organisasi.

Perkembangan IPTEK yang sebelumnya dicermati sebagai peluang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, memberikan kesadaran bahwa infrastruktur TIK yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar masih belum optimal bahkan belum tersedia laboratorium IPTEK Daerah. Pembenahan infrastruktur TIK menjadi hal yang penting untuk menunjang dan memancing Peneliti serta Perekayasa untuk berimprovisasi dalam bekerja dan menghasilkan suatu produk litbang. Selain aspek SDM dan infrastruktur, aspek ketatalaksanaan sebagai salah satu aspek penting keberhasilan organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien agar misi yang diemban organisasi

¹ www.ristek.go.id, 2012, *Sinergitas Kebijakan Program Penelitian Dan Pengembangan Antara Pusat Dan Daerah Provinsi Jatim*, diunduh 24 April 2012



dapat diwujudkan, SOP sebagai salah satu 'alat' perbaikan ketatalaksanaan organisasi masih belum diimplementasikan dengan optimal.

Adalah penting untuk menyiapkan sumberdaya manusia, sistem dan pendanaan yang memadai untuk mendukung profesionalisme lembaga litbang. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah menghasilkan hasil-hasil litbang yang memiliki kualitas akademis yang memadai dan secara konkrit berkontribusi mengatasi masalah yang dihadapi

Lingkungan Eksternal

Eksistensi kelitbangan di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkuat dengan cukup luasnya jaringan/ *networking* kelitbangan yang terbangun, termasuk keberadaan dewan riset daerah yang terus eksis. Sinergitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kelitbangan lainnya menjadi peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Kerjasama-kemitraan dengan lembaga penelitian tidak hanya bertujuan mempererat hubungan dan kolaborasi antar lembaga penelitian, namun yang terpenting adalah bahwa hasil penelitian tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata (*applied research*).

Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian juga menjadi peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk optimalisasi kinerja organisasi. Kebijakan pemerintah dalam mendukung profesionalisme lembaga litbang, yang bersifat langsung, secara eksplisit dicantumkan dalam tiga paket peraturan perundang-undangan, yakni :²

- (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi.
- (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional

² Makhdum Priyatno, Peran Pemerintah dalam Mendukung Profesionalisme Lembaga Litbang, Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kajian yang dilaksanakan oleh PKP2A III Lembaga Administrasi Negara di Samarinda, tanggal 27 Maret 2012



Kebijakan-kebijakan ini tentunya memberi kewenangan, dan mengarahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk semakin meningkatkan kiprah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Urgensi peran Penelitian dan Pengembangan di daerah juga tercermin dalam cukup banyaknya cakupan kegiatan kelitbang yang dapat dilakukan

oleh lembaga litbang di daerah Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi peluang lainnya bagi organisasi. Sesuai Permendagri No 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yakni pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi, kesatuan bangsa dan politik lokal, penataan wilayah, kependudukan dan catatan sipil, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan/masalah aktual sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan daerah.

Dalam hal tuntutan/harapan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian yang semakin tinggi, di satu sisi menjadi peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, namun tuntutan ini di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi Balibangda mengingat kondisi internal yang belum mampu menghasilkan kinerja optimal atau bisa dikatakan belum mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil litbang.

Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan mampu menjadi *resource center* atau 'bank data/informasi' bagi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan di daerahnya. Untuk dapat berperan sebagai *resource center* di daerah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut mampu melakukan berbagai inovasi dan kreativitas serta mampu memerankan dirinya dalam membangun manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Upaya mewujudkan daya saing daerah memerlukan sinergi seluruh komponen kelitbang yang ada di daerah, baik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, lembaga riset Kementerian yang berada di daerah, Dewan Riset Daerah maupun perguruan tinggi serta lembaga-lembaga kelitbang swasta lainnya. Namun, keberadaan lembaga/instansi penelitian



yang lebih kompeten serta kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM dapat menjadi ancaman bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, karena seharusnya Litbang daerah-lah yang merupakan ‘otak’nya Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.1. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

FAKTOR INTERNAL			
No	Strength	No	Weakness
S1	Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	W1	Infrastruktur TIK yang belum optimal dan belum tersedianya laboratorium IPTEK Daerah
S2	Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	W2	Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal
S3	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi <i>leading sector</i> koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah	W3	Mindset SDM belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan
S4	Tersedianya dana yang memadai	W4	Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
		W5	<i>Internal Work Process</i> seperti SOP yang belum diimplementasikan dengan optimal



FAKTOR EKSTERNAL			
No	Opportunities	No	Threat
O1	Jaringan/ networking kelitbang yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset daerah)	T1	Tuntutan stakeholders terhadap publikasi hasil litbang
O2	Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian	T2	Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi
O3	Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	T3	Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten
O4	Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi	T4	Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM

Dari identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian ditentukan nilai urgensi dan bobot faktor untuk masing-masing faktor kondisi lingkungan, serta nilai dukungan dan nilai bobot dukungan. Nilai Urgensi (NU) merupakan nilai yang menentukan seberapa urgen/penting faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pencapaian visi organisasi, digunakan Skala Likert antara 1-5 untuk menentukan urgensi masing-masing faktor. Kemudian Bobot Faktor (BF) dihasilkan dengan rumus $BF = NU / \sum NU \times 100\%$. Dari hasil penilaian terhadap urgensi dan bobot faktor diperoleh tabel sebagai berikut:



Tabel 3.2. Nilai Urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF) dari Setiap Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

STRENGTH	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
S1	5	5 / 39 x 100% = 12,82 %
S2	5	5 / 39 x 100% = 12,82 %
S3	4	4 / 39 x 100% = 10,26 %
S4	4	4 / 39 x 100% = 10,26 %
WEAKNESSES		
W1	4	4 / 39 x 100% = 10,26 %
W2	5	5 / 39 x 100% = 12,82 %
W3	4	4 / 39 x 100% = 10,26 %
W4	5	5 / 39 x 100% = 12,82 %
W5	3	3 / 39 x 100% = 7,69 %
Jumlah	39	100 %
OPPORTUNITY	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
O1	4	4 / 30 x 100% = 13,33 %
O2	3	3 / 30 x 100% = 10 %
O3	4	4 / 30 x 100% = 13,33 %
O4	5	5 / 30 x 100% = 16,67 %
THREATS		
T1	3	2 / 30 x 100% = 10 %
T2	3	1 / 30 x 100% = 10 %
T3	4	2 / 30 x 100% = 13,33 %
T4	4	2 / 30 x 100% = 13,33 %
Jumlah	30	100 %

Keterangan : Bobot Faktor (BF) = $NU / \sum NU \times 100\%$

Sedangkan Nilai Dukungan (ND) merupakan penilaian terhadap seberapa besar kondisi nyata yang ada saat ini berpengaruh terhadap pencapaian visi organisasi, digunakan Skala Likert antara 1-5 untuk menentukan dukungan masing-masing faktor. Nilai Bobot Dukungan (NBD) dihasilkan dengan perhitungan rumus $NBD = ND \times BF$. Nilai dukungan dan nilai bobot dukungan ditentukan sebagai berikut:



Tabel 3.3. Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (DBD) dari Setiap Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

STRENGTH	NILAI DUKUNGAN (ND)	NILAI BOBOT DUKUNGAN (NBD)
S1	4	0,51
S2	5	0,64
S3	2	0,21
S4	3	0,31
WEAKNESSES		
W1	2	0,21
W2	2	0,26
W3	2	0,21
W4	3	0,38
W5	2	0,15
OPPORTUNITY	NILAI DUKUNGAN (ND)	NILAI BOBOT DUKUNGAN (NBD)
O1	4	0,53
O2	3	0,30
O3	3	0,40
O4	4	0,67
THREATS		
T1	3	0,30
T2	2	0,20
T3	4	0,53
T4	4	0,53

Keterangan : Nilai Bobot Dukungan (NBD) = ND x BF : 100

Dari kesemua faktor baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut selanjutnya ditentukan nilai keterkaitan (NK), yaitu seberapa besar keterkaitan masing-masing faktor tersebut satu sama lainnya dengan menggunakan Skala Likert antara 1-5. Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) masing-masing faktor yang telah dijumlahkan tersebut dikalikan dengan bobot faktor dari masing-masing faktor sehingga menghasilkan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK). Penjumlahan antara NBD dan NBK menghasilkan Total Nilai Bobot (TNB).



Tabel 3.4. Nilai Keterkaitan Antara Masing-Masing Faktor

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD	Nilai Keterkaitan																	NRK	NBK	TNB
				(BF x ND)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	($\sum$ NK/n-1)	(BF x NRK)	(NBD +NBK)
S	Strength																							3,60
1	Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	12.82	4	0.51		5	5	5	4	5	3	3	3	3	4	5	4	4	2	2	2	3.93	0.50	1.02
2	Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.82	5	0.64	5		5	5	5	3	3	4	2	4	4	5	4	4	3	3	3	4.13	0.53	1.17
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.26	2	0.21	5	5		3	4	5	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	4.33	0.44	0.65



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2021-2026

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD	Nilai Keterkaitan																	NRK	NBK	TNB
				(BF x ND)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	($\sum$ NK/n-1)	(BF x NRK)	(NBD +NBK)
	menjadi leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah																							
4	Tersedianya dana yang memadai	10.26	3	0.31	5	5	3		5	4	3	5	3	4	3	5	5	5	4	4	4	4.47	0.46	0.77
W	Weakness																							3,51
5	Infrastruktur TIK yang belum optimal dan belum tersedianya laboratorium IPTEK Daerah	10.26	2	0.21	4	5	4	5		5	3	5	4	3	3	4	5	3	3	4	4	4.27	0.44	0.64
6	Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal	12.82	2	0.26	5	3	5	4	5		5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4.73	0.61	0.86
7	Mindset SDM belum	10.26	2	0.21	3	3	4	3	3	5		4	3	5	3	4	4	4	5	4	4	4.07	0.42	0.62



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2021-2026

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD	Nilai Keterkaitan																	NRK	NBK	TNB
				(BF x ND)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	($\sum$ NK/n-1)	(BF x NRK)	(NBD +NBK)
	seluruhnya berorientasi pada kelitbangan																							
8	Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD	12.82	3	0.38	3	4	4	5	5	5	4		4	5	4	4	5	4	3	5	5	4.60	0.59	0.97
9	Internal Work Process seperti SOP yang belum diimplementasikan dengan optimal	7.69	2	0.15	3	2	3	3	4	4	3	4		3	3	3	3	3	2	3	3	3.27	0.25	0.41
O	Opportunity																							4,27
10	Jaringan/ networking kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset daerah)	13.3	4	0.53	3	4	5	4	3	4	5	5	3		4	5	5	4	4	5	5	4.53	0.60	1.14



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2021-2026

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD	Nilai Keterkaitan																	NRK	NBK	TNB
				(BF x ND)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	($\sum$ NK/n-1)	(BF x NRK)	(NBD +NBK)
11	Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian	10.0	3	0.30	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4		4	4	3	3	2	2	3.53	0.35	0.65
12	Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.3	3	0.40	5	5	5	5	4	5	4	4	3	5	4		5	4	3	4	4	4.60	0.61	1.01
13	Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi	16.7	4	0.67	4	4	4	5	5	5	4	5	3	5	4	5		5	4	5	5	4.80	0.80	1.47



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2021-2026

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD	Nilai Keterkaitan																	NRK	NBK	TNB
				(BF x ND)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	($\sum$ NK/n-1)	(BF x NRK)	(NBD +NBK)
T	Threat																							3,48
14	Tuntutan stakeholders terhadap publikasi hasil litbang	10.0	3	0.30	4	4	4	5	3	5	4	4	3	4	3	4	5		4	4	4	4.27	0.43	0.73
15	Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi	10.0	2	0.20	2	3	3	4	3	4	5	3	2	4	3	3	4	4		4	5	3.73	0.37	0.57
16	Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten	13.3	4	0.53	2	3	4	4	4	4	4	5	3	5	2	4	5	4	4		5	4.13	0.55	1.08
17	Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM	13.3	4	0.53	2	3	4	4	4	4	4	5	3	5	2	4	5	4	5	5		4.20	0.56	1.09



3.5.2.2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)/ Critical Success Factors

Yang dimaksud faktor-faktor menentu keberhasilan (FPK) atau *Critical Success Factors* (CSF) disini adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan Bappeda yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan atau Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil dari Analisa SWOT yang dilakukan pada tahap Analisa Strategi dan Pilihan (ASAP) dan merupakan hasil perpaduan faktor-faktor strategis lingkungan internal vs faktor-faktor lingkungan eksternal. Dengan kata lain, FPK atau Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) merupakan peringkat prioritas dari TNB terbesar dari masing-masing faktor.

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi atau unit kerja dalam mencapai visi misi dan tupoksinya. Dari setiap kategori strength, weaknesses, opportunities, dan threats masing-masing dipilih 2 (dua) FKK berdasarkan urutan TNB. Cara menentukan FKK dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- FKK dipilih dari nilai TNB terbesar
- Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar
- Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar
- Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar
- Bila masih sama, maka dipilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional (*Professional Judgement*).

Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor dapat disimak dalam tabel berikut :



Tabel 3.5. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urutan FKK	FAKTOR INTERNAL		
	Kekuatan - <i>Strength</i>		Kelemahan - <i>Weakness</i>
S1	Komitmen Kepala Daerah Terpilih yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	W1	Hasil-hasil <i>outcome</i> penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
S2	Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	W2	Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal
Urutan FKK	FAKTOR EKSTERNAL		
	Peluang - <i>Opportunities</i>		Ancaman - <i>Threats</i>
O1	Tuntutan <i>stakeholders</i> terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi	T1	Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM
O2	Jaringan/ networking kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN))	T2	Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten



Sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka berdasarkan hasil evaluasi, yang dipilih dari analisis SWOT adalah

- S : Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011
- W : Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
- O : Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi
- T : Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM

Berdasarkan Total Nilai Bobot (TNB) semua faktor, maka dapat dipetakan di posisi mana organisasi tersebut berada dan langkah strategi apa yang harus dilakukan.

3.5.2.3. Analisis Strategi dan Pilihan (ASAP)

Analisis Strategi dan Pilihan (ASAP) merupakan evaluasi dan analisis lebih lanjut dan informasi yang telah dikembangkan pada tahap-tahap sebelumnya. Informasi tersebut sangat diperlukan dalam menentukan rangkuman kegiatan yang harus dilaksanakan dan harus berorientasi pada Misi dalam usaha menerapkan Visi.

Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempergunakan analisis SWOT sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategis yaitu :

1. Strategi *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 - Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mendukung komitmen kepala daerah terhadap pembangunan
 - Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mensinergikan jaringan/ networking kelitbang yang telah terbangun untuk penguatan jaringan inovasi daerah



- Optimalisasi pemanfaatan dukungan anggaran untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam penerapan reformasi birokrasi
- 2. Strategi *Strength–Threats* (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan/ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
 - Optimalisasi fungsi/kewenangan sebagai leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbangan yang telah terbangun
 - Optimalisasi fungsi/kewenangan didukung komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3. Strategi *Weaknesses–Opportunities* (WO), yaitu strategi memperkecil/ mengurangi *kelemahan* dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 - Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam menghasilkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semakin berkualitas dan lebih aplikatif
 - Meningkatkan sinergi jejaring kelitbangan untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah
- 4. Strategi *Weaknesses–Threats* (WT), yaitu strategi memperkecil/ mengurangi *kelemahan* untuk mencegah dan mengatasi tantangan/ancaman
 - Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memberikan kontribusi bagi penelitian di daerah dan bersinergi dengan peneliti dan perekayasa di lembaga/instansi penelitian lain.
 - Membangun sinergi dengan lembaga penelitian lainnya dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang langsung dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan SKPD guna meningkatkan pembangunan di daerah



**Formulasi strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara**

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	1. Infrastruktur TIK yang belum optimal dan belum tersedianya laboratorium IPTEK Daerah
FAKTOR EKSTERNAL	2. Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2. Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal
	3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi <i>leading sector</i> koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah	3. Mindset SDM belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan
	4. Tersedianya dana yang memadai	4. Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
		5. <i>Internal Work Process</i> seperti SOP yang belum diimplementasikan dengan optimal



PELUANG	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Jaringan/ networking kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset daerah)	1. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mendukung komitmen kepala daerah terhadap pembangunan	1 Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam menghasilkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semakin berkualitas dan lebih aplikatif
2. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian	2. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbangan yang telah terbangun untuk penguatan jaringan inovasi daerah	2 Meningkatkan sinergi jejaring kelitbangan untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah
3. Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3. Optimalisasi pemanfaatan dukungan anggaran untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam penerapan reformasi birokrasi	3

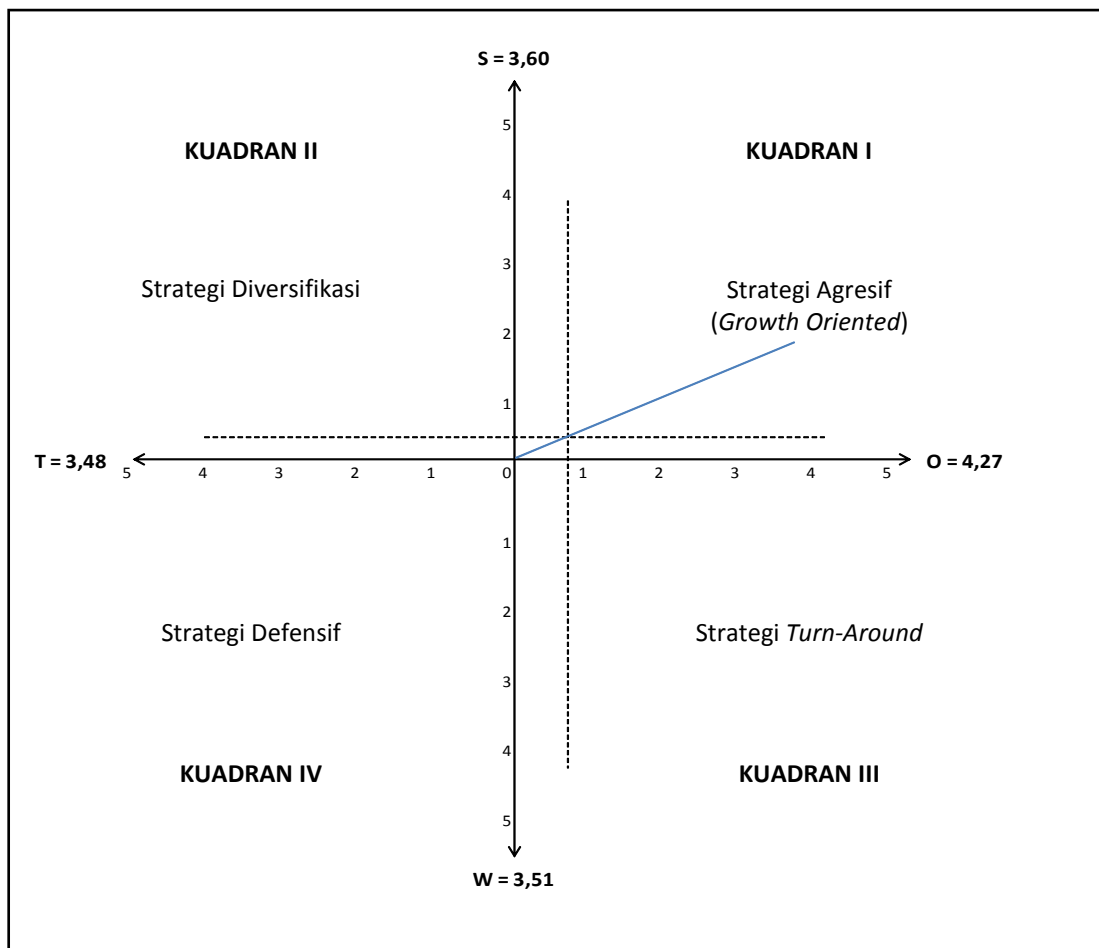


4. Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi		
ANCAMAN	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Tuntutan stakeholders terhadap publikasi hasil litbang	1. Optimalisasi fungsi/kewenangan sebagai leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbang untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbang yang telah terbangun	1. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memberikan kontribusi bagi penelitian di daerah dan bersinergi dengan peneliti dan perekayasa di lembaga/instansi penelitian lain.
2. Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi	2. Optimalisasi fungsi/kewenangan didukung komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2. Membangun sinergi dengan lembaga penelitian lainnya dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang langsung dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan SKPD guna meningkatkan pembangunan di daerah



3. Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten		
4. Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM		

Dari penghitungan yang telah dilakukan terhadap semua faktor tersebut maka diperoleh jumlah TNB untuk masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nilai tertinggi untuk faktor internal dan nilai tertinggi untuk faktor eksternal menentukan posisi kuadran kondisi lingkungan strategis organisasi. Perhitungan yang telah dilakukan terhadap faktor di atas menghasilkan TNB untuk kekuatan adalah 3,60; kelemahan adalah 3,51; peluang adalah 4,27; dan ancaman adalah 3,48. Dengan demikian untuk faktor kondisi internal harus diakui bahwa faktor yang lebih dominan adalah kekuatan (*Streght*) sedangkan faktor eksternal lebih dominan faktor peluang (*Opportunity*). Posisi kuadran terletak pada kuadran *Strength–Opportunities* (SO), seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.1.

**Peta Posisi Kekuatan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Diagram peta posisi kekuatan berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada kuadran *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi mengoptimalkan *kekuatan* dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar menyadari bahwa faktor lingkungan yang paling dominan adalah kelemahan dan peluang, sehingga strategi yang digunakan sebelumnya adalah strategi WO atau strategi Turn – Around (*Minimizing Internal problem Strategy*), yang berarti bahwa untuk dapat menjangkau dan memanfaatkan peluangnya, suatu organisasi harus dapat mendayagunakan seluruh potensi dan



kekuatan yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seiring dengan berbagai perubahan serta perbaikan kinerja Pemerintahan memicu terjadinya pergeseran strategi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kewenangan dan peluang yang dimiliki serta berbagai perbaikan internal yang dilakukan mengarahkan dirinya untuk berada pada strategi *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada, yakni dengan melakukan :

1. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mendukung komitmen Kepala Daerah terhadap pembangunan;
2. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbangan yang telah terbangun untuk penguatan jaringan inovasi daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan dukungan anggaran untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam penerapan reformasi birokrasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Visi. Setiap Misi yang ada dalam Rencana Strategis dikembangkan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang bisa berjumlah satu atau lebih. Urgensitas dari penetapan tujuan sebagai bagian dalam penyusunan sebuah Rencana Strategis merupakan bentuk dari pelaksanaan Visi dan Misi yang secara ideal ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai masa berlakunya Rencana Strategis. Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dikembangkan kepada sasaran yang akan direalisasikan.

Disamping sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dapat juga menjadi instrumen untuk mencapai hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh sebuah organisasi. Untuk mengukur pencapaian masing-masing sasaran maka dibuatlah indikator kinerja sasaran, yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk melihat capaian sasaran setiap tahunnya selama periode perencanaan. Berikut adalah rincian tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dari lima Misi yang ada di dalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar dalam Tabel T-C 25 :



Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melakukan evaluasi pelaksanaan Visi, Misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan yang strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian dari Bab I, II dan III di atas dapat dirumuskan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mencapai Visi dan Misi yang telah dibangun. Kebijakan yang dirumuskan merupakan pedoman pelaksanaan yang secara tajam mengarahkan tindakan-tindakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menuju keberhasilan strategi. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka setiap pejabat dan pelaksana harus mengetahui apakah mereka telah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan perencanaan strategis.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Penelitian dan Pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Daerah;
2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Penelitian dan Pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Inovasi dan Teknologi;
4. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Sosial dan Kependudukan;
5. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penghimpunan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian



data, informasi, serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perumusan kebijakan daerah;

6. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/satuan kerja.

Adapun program kerja operasional merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja. Program-program tersebut telah ditetapkan di RPJMD, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah hanya menyesuaikan diri pada program-program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Atas dasar hal tersebut, serta mengingat tugas dan fungsi, maka program-program operasional yang akan dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. Program Penelitian dan Pengembangan pada Misi 1 :
 1. Program Kajian Pola Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Program Kajian tentang Persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Program Kajian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Proses Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Program Raker Jaringan Penelitian (Jarlit) Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Program Pembentukan Forum Jaringan Penelitian Bidang Kemasyarakatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Program Studi Kasus dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Program Analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) di SD/MI di Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Program Penelitian dan Pengembangan pada Misi 2 :
 1. Program Penelitian Baseline Distribusi Pangan
 2. Program Tinjauan Ekonomoi Degradasi Lahan Pertanian Produktif akibat Eksplorasi Batu Bara di Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Program Penelitian Sumber Daya Perikanan Kawasan Pesisir Mahakam



4. Program Penelitian Kompetensi Agrobisnis untuk Desa Konsesi Pertambangan Batubara
 5. Program Penelitian Layout Pasar Tradisional untuk memberikan Kepuasan Masyarakat
 6. Program Studi tentang Pengembangan Potensi Peternakan Sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Program Peranan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Program Analisis Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara
 9. Program Kajian Pengembangan Sistem Marketing Sektor Pariwisata
- c. Program Penelitian dan Pengembangan Misi 3 dan 4 :
1. Program Kajian Konservasi Lahan Marjinal Berpasir melalui Penanaman Budidaya Buah Naga di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Program Kajian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 3. Program Kajian Potensi Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir
 4. Program Kajian Tingkat Pencemaran Air Sungai Mahakam terhadap Limbah Perusahaan
 5. Program Kajian Peningkatan Produktivitas Padi Sawah dengan Teknologi Leisa di Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Program Kajian Konservasi Limbah Pertanian sebagai Pakan Ruminansia pada Peternak Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Program Kajian Kawasan Pengembangan Budidaya Tanaman Pisang Sistem Sawit Blok di Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Program Kajian Pelestarian Sumberdaya ex Lahan Tambang menjadi Lahan Produktif
- d. Program Misi 5 :
- Program Penelitian dan Pengembangan
1. Program Penyusunan Data Pokok Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Program Penyusunan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi
 3. Program Analisis Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Program Analisis Profil Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Program Analisis Ketersediaan dan Konsumsi Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara



6. Program Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja dan Mengarang se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Program Penerbitan Bulletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi Ilmiah
 8. Program Studi Khasanah Budaya Kutai sebagai Sarana Pelestarian Budaya Bangsa
 9. Program Penguatan Kebijakan Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Program Pembuatan/Pengelolaan Website Balitbangda

e. Program Misi 6 :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 2. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Program Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 2. Program Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Formal
 2. Program Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Operator Komputer dan Bahasa Inggris Bagi Pegawai
 4. Program Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif
 5. Program Bimbingan Teknis Tata Cara Penulisan Naskah Karya Ilmiah Tingkat Dasar
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Program Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Program Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Program Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik



3. Program Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Program Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Program Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Program Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Program Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Program Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Program Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Program Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Program Pengadaan Buku-Buku Literatur Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Program Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
15. Program Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan (Rakor Litbang) Kab. Kukar Antar Dinas dan Kecamatan
16. Program Penunjang Kegiatan Olahraga Balitbangda
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran
 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran.

Program kerja operasional di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung bagi pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi. Kegiatan penunjang tersebut dapat dilakukan secara rutin/berkala tanpa harus dimasukkan dalam ke dalam dokumen rencana strategis. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan target output pertahunnya dapat dilihat dalam Bab berikutnya. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja yang berdimensi 5 (Lima) tahunan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021–2026 diarahkan pada Visi dari Misi “*KUKAR IDAMAN* “ (Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri), yang menjadi Pedoman Dalam Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan. Berdasarkan Visi Kukar “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”, Agenda Prioritas Pembangunan Berdasarkan Misi : 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah; 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021–2026, sebagaimana Misi dari Visi “*KUKAR IDAMAN* “(Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri), maka strategi dan kebijakan perangkat daerah Balitbangda (Badan penelitian dan pengembangan daerah). Sebagaimana tergambar pada Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	:	“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”		
MISI (RPJMD)*	:			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah	Melaksanakan Kajian dan Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Optimalisasi kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keuangan Perangkat Daerah
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Aparatur Umum

*misi RPJMD yang terkait tugas dan fungsi perangkat daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Keberadaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sangat penting agar sebuah Perencanaan Strategis dapat berjalan optimal sehingga sasaran dan tujuan selama 5 tahun kedepan dapat diwujudkan.

Terkait dengan Rancangan Akhir seperti yang tersebut diatas, Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rutin),**
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Strategis) terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :**

- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan dengan 15 Sub Kegiatan;
- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial kependudukan dengan 11 Sub Kegiatan;
- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan 12 Sub Kegiatan;
- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Tehnologi dengan 5 Sub Kegiatan.

Sebagaimana diketahui dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026. bertujuan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah wujud dari tanggungjawab guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan **Kegiatan** merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sub. Bidang, kegiatan yang ada merupakan ukuran kinerja dan harus dilakukan dalam tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu. Menurut sifatnya, kegiatan dapat dibagi menjadi kegiatan yang bersifat Rutin dan Strategis, Kegiatan Rutin merupakan kegiatan pendukung yang umumnya dilaksanakan setiap tahun dan tidak terkait langsung dengan sasaran strategis.



Sebaliknya, kegiatan strategis merupakan kegiatan utama yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis.

Terkait dengan capaian kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis. Tingkat capaian Kegiatan nantinya akan dapat digunakan untuk mengukur atau menjelaskan tingkat capaian program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Untuk menunjang peningkatan kinerja tentu saja dibutuhkan **Pendanaan**, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku OPD pendukung kami berusaha maksimal memanfaatkan pagu yang tersedia, selain itu kami berusaha mencari sumber pendanaan lainnya dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Kutai kartanegara, Pokok Pikiran dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pandemi Covid-19 adalah momok bagi semua OPD, Sebagian besar APBD digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, untuk solusi permasalahan tersebut Balitbangda mempunyai strategis khusus dengan melakukan *Kajian Mandiri*, Kajian Mandiri dilakukan untuk menanggapi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, sedangkan untuk kasus yang perlu tindakan cepat kami melakukan koordinasi dengan OPD terkait dengan melakukan *Riset Cepat*.

Hasil Kajian Mandiri maupun Riset Cepat berupa Rekomendasi kami berikan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijaksanaan.

Adapun *Rancangan Akhir* Rencana Strategis (Renstra) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja menurut kelompok sasaran beserta perkiraan pendanaannya (pendanaan indikatif) dalam perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021 - 2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1 yang bersumber dari T-C.27 sebagai berikut.

(T-C. 27 terlampir)

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)																								
Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3				4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84(A)	11.924.800.317	87(A)	11.924.800.317	91(A)	11.924.800.317	93(AA)	11.924.800.317	95 (AA)	11.924.800.317	95 (AA)					
			5	05	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	270.000.000	11	270.000.000	11	270.000.000	11	270.000.000	11	270.000.000	55	1.350.000.000			
			5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		
			5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	40	500.000.000		
			5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	350.000.000		
			5	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	7	10.013.343.480	7	10.013.343.480	7	10.013.343.480	7	10.013.343.480	7	10.013.343.480	35	50.066.717.400			
			5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Bulan	Bulan	1090	9.866.553.480	1090	9.866.553.480	1090	9.866.553.480	1090	9.866.553.480	1090	9.866.553.480	5450	49.332.767.400		
			5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	146.790.000	6	146.790.000	6	146.790.000	6	146.790.000	6	146.790.000	30	733.950.000		
			5	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	90.000.000	7	90.000.000	7	90.000.000	7	90.000.000	7	90.000.000	35	450.000.000			
			5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD	Laporan	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30	250.000.000		
			5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000		
			5	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen	6	155.000.000	6	155.000.000	6	155.000.000	6	155.000.000	6	155.000.000	30	775.000.000			
			2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN	Orang	10	95.000.000	10	95.000.000	10	95.000.000	10	95.000.000	10	95.000.000	50	475.000.000		
			2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	25	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggun jawab	Lok asi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	Pelayanan	7	576.647.962	7	576.647.962	7	576.647.962	7	576.647.962	7	576.647.962	35	2.883.239.810			
			5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	15	135.000.000	15	135.000.000	15	135.000.000	15	135.000.000	15	135.000.000	75	675.000.000		
			5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	11	124.450.000	11	124.450.000	11	124.450.000	11	124.450.000	11	124.450.000	55	622.250.000		
			5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	4	30.002.325	3	30.002.325	3	30.002.325	3	30.002.325	3	30.002.325	16	150.011.625		
			5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	OH	429	149.992.000	429	149.992.000	429	149.992.000	429	149.992.000	429	149.992.000	2145	749.960.000		
			5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	37	61.320.000	37	61.320.000	37	61.320.000	37	61.320.000	37	61.320.000	185	306.600.000		
			5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	2	45.883.637	2	45.883.637	2	45.883.637	2	45.883.637	2	45.883.637	10	229.418.185		
			5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Web	Web	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000		
			5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	432	684.808.875	432	684.808.875	432	684.808.875	432	684.808.875	432	684.808.875	2160	3.424.044.375		
			5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	48	58.915.728	48	58.915.728	48	58.915.728	48	58.915.728	48	58.915.728	240	294.578.640		
			5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Orang/Bulan	384	625.893.147	384	625.893.147	384	625.893.147	384	625.893.147	384	625.893.147	1920	3.129.465.735		
			5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	243	135.000.000	243	135.000.000	243	135.000.000	243	135.000.000	243	135.000.000	1215	675.000.000		
			5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	Unit	31	65.000.000	31	65.000.000	31	65.000.000	31	65.000.000	31	65.000.000	155	325.000.000		
			5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	212	70.000.000	212	70.000.000	212	70.000.000	212	70.000.000	212	70.000.000	1060	350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam kebijakan pembangunan daerah						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah	Persen	100	2.025.000.000	100	1.490.000.000	100	1.490.000.000	100	1.490.000.000	100	1.490.000.000	100	7.985.000.000		
			5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	660.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	1.160.000.000		
			5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	3 Dokumen	660.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	7 Dokumen	1.160.000.000		
			5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dokumen	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000		
			5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	1	235.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	235.000.000		
			5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dokumen	-	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	1	125.000.000		
			5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	-	-	-	-	1	125.000.000	-	-	-	1	125.000.000		
			5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ng jawab	Lok asi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Dokumen	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000	1	125.000.000		
		5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi								
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
1	2	3					4	5	6	8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Persen	100	1.115.000.000		100	1.115.000.000		100	1.115.000.000		100	1.115.000.000		100	1.115.000.000		100	5.575.000.000			
		5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Dokumen	2 Dokumen	1.115.000.000		2 Dokumen	1.115.000.000		2 Dokumen	1.115.000.000		2 Dokumen	1.115.000.000		2 Dokumen	1.115.000.000		10 Dokumen	5.575.000.000			
		5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	115.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	115.000.000			
		5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
		5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah situs yang ditemukan	Situs	-	-		1	115.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	115.000.000			
		5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
		5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	1	115.000.000		-	-	-	-	1	115.000.000			
		5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
		5	05	02	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
		5	05	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	-	-		-	-	1	115.000.000		-	-	-	-	-	-	1	115.000.000				
		5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	Dokumen	-	1.000.000.000		-	1.000.000.000		-	1.000.000.000		-	1.000.000.000		-	1.000.000.000		0	5.000.000.000			
		5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen		-		-	-	-	-	-	-	-	1	115.000.000		1	115.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3						4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	625.000.000		
		5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	625.000.000		
		5	05	02	2.03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.03	02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	-	-	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.03	03		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	05		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.03	06		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	07		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	08		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	09		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	10		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	11		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		5	05	02	2.03	12		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000	1	125.000.000			
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	625.000.000		
		5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	625.000.000		
		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah dokumen Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000			
		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Diseminasi	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kali	-	-	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	1	125.000.000		
		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	125.000.000	1	125.000.000			
										7	13.949.800.317	5	13.414.800.317	5	13.414.800.317	5	13.414.800.317	5	13.414.800.317	27	67.609.001.585		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai OPD pendukung mempunyai 2 Program, 5 Kegiatan dan 43 Sub Program bisa masuk disemua misi dalam mendukung keberhasilan RPJMD dan 23 Program Dedikasi Kepala Daerah terpilih, dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan bisa masuk pada beberapa Misi yaitu :

Misi 1 : *Memantapkan Reformasi Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani (Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan 15 Sub Kegiatan dan Tim Bekias)*

Misi 2 : *Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya (Bidang Sosial dan Kependudukan dengan 11 Sub Kegiatan dan Tim Indeks Partisipasi Masyarakat)*

Misi 3 : *Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan 12 Sub Kegiatan dan Tim Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan)*

Misi 4 : *Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah (Bidang Inovasi dan Tehnologi dengan 5 Sub Kegiatan Tim Inovasi Daerah serta Tim IDSD)*

Misi 5 : *Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan (semua Bidang yang ada di Balitbangda dengan 43 Sub Kegiatan)*

Dengan 4 Kegiatan serta 43 Sub Kegiatan yang ada, diharapkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah lebih Efektif, Efisien dan melayani dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, ini kami sajikan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28.**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 rekening	24	24	24	24	24	120
		41 Unit	41	35	33	33	33	175
	Jumlah jasa administrasi keuangan	984	216	123	123	208	208	878
2	Jumlah Alat Tulis Kantor	40 Jenis	26	30	30	30	30	146
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2600 Cetak	1000	1750	3000	3000	3000	11750

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundang-Undangan	14.000 Eks	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bahan Logistik Kantor	500 Jenis/Buah		400	400	400	400	1600
	Jumlah Makanan dan Minuman	3000 Porsi	1200	1250	1250	1250	1250	6200
	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	85 OH	71	95	95	95	95	451
	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	32 OB	384	384	384	384	384	1920
		0	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali	0	0	0	2	2	4
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik							
	Jumlah peralatan gedung kantor	0	0	10	35	35	35	115

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0	0	0	35	35	35	105
	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	1	30	30	30	30	121
	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan	0	0	5	6	6	6	23
	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	1	35	35	35	106
	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0	16	35	35	35	121
	Jumlah Buletin Jurnal	0	200	200	200	200	200	1000
	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	0						
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP							
	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	0	0	0	10	10	20
	Jumlah dokumen	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Inovasi	-	0	1	1	1	1	4
	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja							
	Jumlah laporan			9	10	10	10	39
	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset							
	Jumlah laporan	9	9	5	9	9	9	41
	Persentase Penurunan Temuan Audit							
	Jumlah laporan	0		1	1	1	1	4
	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian/Inovasi Yang Terimplementasi		100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan		100	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen		1					1
	Jumlah Dokumen			1				1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen		5		1	3	3	12
	Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan		100	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen			1				1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Dokumen		1					1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen		1		1	1	1	4
	Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan		100	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen		1					1
	Jumlah Dokumen			1				1
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen		1					1
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Dokumen				1	1	1	3
	Cakupan Inovasi di bidang Teknologi		100	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen		1					1
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen			1				1
	Jumlah Dokumen				1			1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen			1	1	1	1	4

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen							0
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen					1		1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen						1	1
	Jumlah Dokumen			1	1	1	1	4



Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, target, sasaran, dan tujuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang harus dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat hasil akhir yang ingin dicapai RPJMD pada Program dan Kegiatan tidak lagi bertumpu pada Keluaran (Output) tapi sudah diarahkan pada Hasil (Outcome) sehingga Rekomendasi yang dihasilkan harus Rekomendasi Operasional.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepedulian dan peran aktif ini sangat menentukan keberhasilan program dan Kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ingin dicapai yaitu “ **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA** “.



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur Balitbangda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Review Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Balitbangda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Balitbangda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Review Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

Rangkuti, Freddy., 2005, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Makhdom Priyatno, *Peran Pemerintah dalam Mendukung Profesionalisme Lembaga Litbang*, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kajian yang dilaksanakan oleh PKP2A III Lembaga Administrasi Negara di Samarinda, tanggal 27 Maret 2012

www.ristek.go.id, 2012, *Sinergitas Kebijakan Program Penelitian Dan Pengembangan Antara Pusat Dan Daerah Provinsi Jatim*, diunduh 24 April 2012